

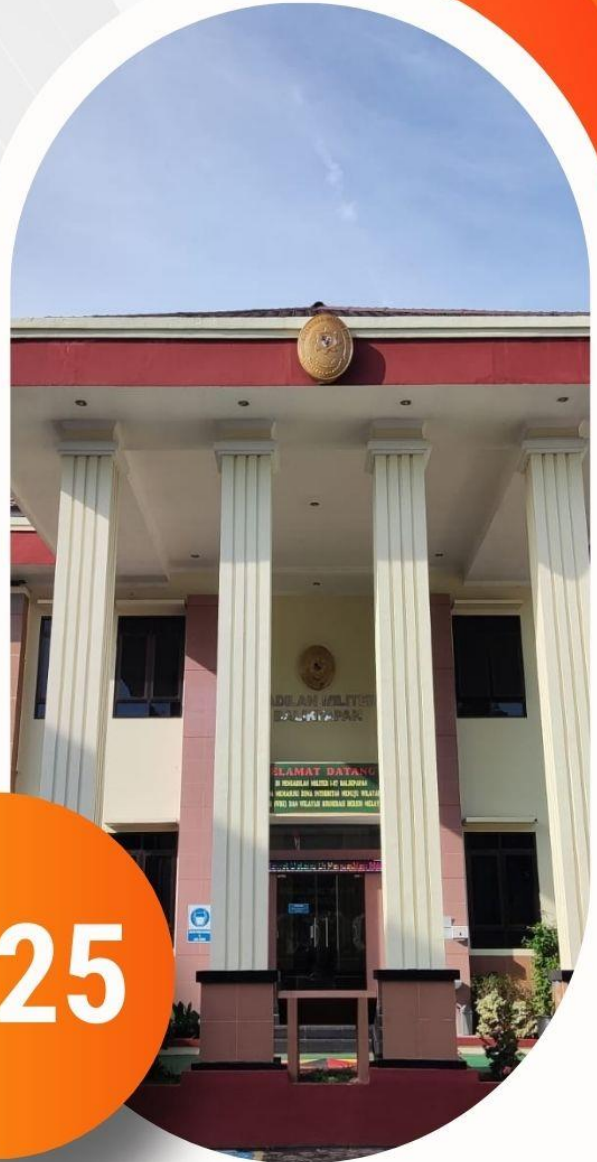


**PENGADILAN
MILITER I-07
BALIKPAPAN**

LAPORAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUNAN TAHUN 2025

2025



-  (0542) 8520025
-  www.dilmil-balikpapan.go.id
-  [pengadilanmiliterbalikpapan](https://www.instagram.com/pengadilanmiliterbalikpapan)
-  [Pengadilan Militer Bpp](https://www.facebook.com/PengadilanMiliterBpp)
-  [@Militer07](https://twitter.com/Militer07)
-  08115966006

Lampiran III : SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 16292/SEK/OT1.6/11/2025
TANGGAL : 25 November 2025

**PERNYATAAN TELAH DI REVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Militer I-07 Balikpapan untuk Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Mengetahui :
Pereviu I

Letnan Kolonel Chk Tabah Prasetya

Balikpapan, 23 Februari 2026

Pereviu II

Kapten Chk Herman

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat diselesaikan dan disajikan sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2025 ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan Visi, Misi, dan Tupoksi yang diembannya kepada publik, yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini juga memuat pelaporan kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan atas pencapaian output kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Adapun beberapa program yang telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat bagi seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Balikpapan, 27 Februari 2026

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Letnan Kolonel Chk. Tabah Prasetya

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2025 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan 2025 – 2029 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2025 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2025. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2025 – 2029.

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang secara umum diharapkan dapat dicapai sebagai berikut:

- Pertama: Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi dan,
- Kedua : Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran **Pertama** Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern, **Kedua** adalah Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik, dan **Ketiga** adalah Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 15 (lima belas) indikator kinerja dan target kinerja sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2701/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 25 November 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari tiga sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan atau Perjanjian Kinerja Tahun 2025 rata-rata persentase capaian kinerja mencapai 103,85% (seratus tiga koma delapan puluh lima persen).

Guna mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengusulkan program yang dituangkan di dalam DIPA sebagai berikut:

- a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.
- b. Program Dukungan Manajemen.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN		
NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	100
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	113,70
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	97,85
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KESELURUHAN: 103,85%		

Tabel 1: Tabel Pencapaian Kinerja Keseluruhan

FAKTOR PENDUKUNG:

Capaian kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan secara keseluruhan pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata nilai capaian seluruh sasaran strategis sebesar 103,85% (seratus tiga koma delapan puluh lima persen) dari keseluruhan sasaran strategis yang ada, seluruh nilai capaiannya lebih dari 100% (seratus persen) dan memenuhi target yang telah ditentukan.

Saat ini reformasi birokrasi lembaga peradilan khususnya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah berlangsung dengan sangat baik. Hal tersebut berdampak pada pencapaian target kinerja tersebut yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan kegiatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di dukung oleh peningkatan kinerja Hakim dan Panitera serta kinerja aparatur non teknis pengadilan sehingga terpenuhinya target kinerja tersebut.

Pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis I Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel pada tahun 2025 sebesar 100% (seratus persen). Rincian capaian kinerja Sasaran Strategis I tersebut tergambar pada tabel capaian kinerja berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS I			
	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern			
	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%
2.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
3.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
4.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%

5.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
6.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	0%	0%	100%
7.	Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	7,4%	7,4%	100%
8.	Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	7,4%	7,4%	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS I: 100 %				

Tabel 2: Tabel Sasaran Strategis I

Pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis II Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik pada tahun 2025 sebesar 113,70% (seratus tiga belas koma tujuh puluh persen). Rincian capaian kinerja Sasaran Strategis II tersebut tergambar pada tabel capaian kinerja berikut:

SASARAN STRATEGIS II				
NO	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	80%	90,96%	113,70%
RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS II : 113,70%				

Tabel 3: Tabel Sasaran Strategis II

Pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis III Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional pada tahun 2025 sebesar 97,85% (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh lima persen). Rincian capaian kinerja Sasaran Strategis III tersebut tergambar pada tabel capaian kinerja berikut:

SASARAN STRATEGIS III				
NO	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN

1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	85	32.5	40,62%
2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	95	96,75	101,84%
3.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun	85	88,83	104,50%
4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	80	100	125%
5.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun	70	80,58	115.11%
6.	Indeks Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	90	90	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS III : 97,85 %				

Tabel 4: Tabel Sasaran Strategis III

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang.....	9
B. Maksud dan Tujuan	11
C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	12
D. Struktur Organisasi	17
E. Sumber Pendanaan	18
F. Isu Strategis.....	20
G. Sistematika Penyajian.....	21
BAB II PERENCANAAN KERJA	24
A. Rencana Strategis	24
B. Perjanjian Kinerja 2025	30
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Januari s.d. September Tahun 2025)	30
2. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
A. Capaian Kinerja Organisasi	36
B. Realisasi Anggaran	136
C. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024.....	139
BAB IV PENUTUP	149
A. Kesimpulan.....	149
B. Saran	149
C. Penutup.....	149

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amandemen Keempat Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat (1) menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dikemukakan: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai Lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang No. 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang - Undang tersebut dinyatakan bahwa asas - asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintahan negara, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, apalagi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan juga menggunakan dana APBN. Baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, apalagi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan juga menggunakan dana APBN, baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan

secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP).

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama satu tahun anggaran. Laporan ini disusun untuk memenuhi kewajiban instansi pemerintah dalam melaporkan akuntabilitas kinerja kepada pihak yang berkepentingan. Dokumen ini menjadi bukti nyata komitmen kami dalam menjalankan amanah reformasi birokrasi yang bersih dan melayani. Melalui laporan ini, kami berupaya menyajikan informasi yang transparan mengenai capaian kinerja organisasi secara menyeluruh. Penyusunan laporan ini juga mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Diharapkan laporan ini dapat menjadi landasan evaluasi yang objektif bagi peningkatan kinerja di masa mendatang.

Maksud utama pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat pencapaian sasaran dan tujuan strategis instansi. Laporan ini berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kami menggunakan data yang akurat untuk membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai di lapangan. Selain itu, dokumen ini dimaksudkan untuk transparansi penggunaan anggaran DIPA dalam mendukung kegiatan operasional dan teknis yustisial. Laporan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi selama periode pelaporan berjalan. Dengan demikian, laporan ini menjadi bahan masukan yang sangat berharga bagi perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik atau good governance di lingkungan peradilan militer. Kami bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada para pencari keadilan melalui evaluasi kinerja yang berkelanjutan. Laporan ini juga bertujuan untuk memberikan umpan balik bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan strategis organisasi. Tujuan lainnya adalah untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Kami

ingin memastikan bahwa setiap program kerja memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat dan negara. Dokumen ini juga menjadi sarana strategis untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas lembaga peradilan.

Secara khusus, laporan ini bertujuan untuk memenuhi standar pelaporan kinerja yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku induk organisasi. Kami berupaya menyelaraskan pencapaian kinerja satuan kerja dengan visi dan misi besar badan peradilan Indonesia. Laporan ini juga bertujuan untuk mendokumentasikan prestasi serta inovasi yang telah dilakukan oleh seluruh aparaturnya. Evaluasi yang tertuang di dalamnya bertujuan untuk memperbaiki manajemen penyelesaian perkara agar lebih cepat dan berbiaya ringan. Kami juga menargetkan peningkatan disiplin dan profesionalisme aparaturnya melalui sistem monitoring kinerja yang ketat dan terukur. Laporan ini menjadi bukti administrasi yang valid dalam rangka penilaian zona integritas menuju wilayah bebas korupsi

C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan tugas pokok dan fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut:

1. Kedudukan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai pelaksana Badan peradilan Militer yang menjalankan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan semenjak tanggal 9 Juli 2004 secara Organisasi, Administrasi dan Finansial berkedudukan/berada

di bawah Mahkamah Agung RI, sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung RI mempunyai kedudukan yang kuat.

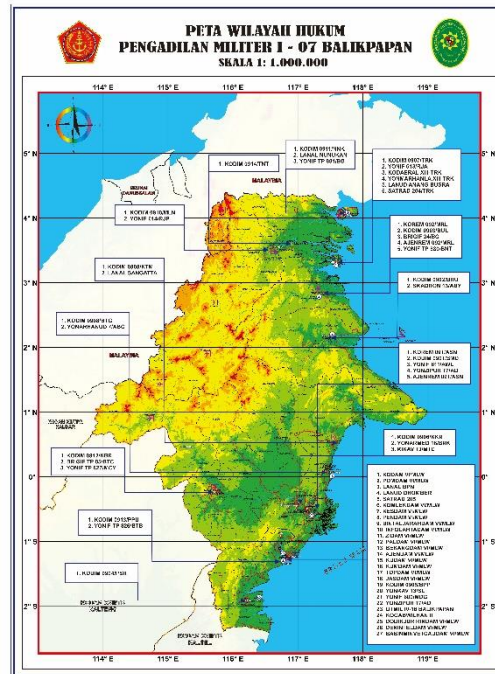


Foto Tampak Depan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 Ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sejak tanggal 9 Juli 2004 secara Organisasi, Administrasi dan Finansial berkedudukan/berada di bawah Mahkamah Agung RI, sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (MABES TNI) Ke Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang mengacu pada Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 serta berdasarkan pada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Kep/109/VII/1985 dan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah merupakan Pengadilan Tingkat

Pertama Tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).



Peta Wilayah Hukum Dilmil I-07 Balikpapan

Wilayah Hukum (jurisdiksi) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan meliputi:

- 2 (dua) Provinsi yaitu:
 - a. Provinsi Kalimantan Timur
 - b. Provinsi Kalimantan Utara
- 4 (empat) Kota yaitu:
 - a. Kota Samarinda
 - b. Kota Balikpapan
 - c. Kota Bontang
 - d. Kota Tarakan
- 5 (lima) Kabupaten terdiri dari:
 - a. Kabupaten Kutai Timur
 - b. Kabupaten Berau
 - c. Kabupaten Bulungan
 - d. Kabupaten Malinau
 - e. Kabupaten Nunukan

2. Tugas Pokok

Mengenai justisiabel Peradilan Militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Militer (prajurit TNI) berpangkat Kapten ke bawah yang melakukan tindak pidana (kejahatan) maupun pelanggaran masih berdinasi aktif dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya baik itu teknis yudisial maupun non teknis yudisial Peradilan Militer menetapkan visi dan misi sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka terwujudnya badan peradilan yang ideal.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan peradilan, struktur yang mengatur tata kerja disuatu lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tugas pokoknya menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang - undangan.

3. Fungsi

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, di bidang fungsi teknis yudisial bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi ideal yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010-2035. Fungsi teknis tersebut antara lain:

a. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*) yakni:

- 1) Memeriksa dan memutus dalam Peradilan Tingkat Pertama atas perkara-perkara tindak pidana dan pelanggaran yang terdakwa adalah prajurit TNI berpangkat Prada sampai dengan Kapten (berdasarkan Perundang-undangan menjadi wewenangnya).

2) Mengatur dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi, Grasi dan Peninjauan Kembali dalam perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.

b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan kepada Jajarannya tentang teknis yudisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.

c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan internal dilingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan atas pelaksanaan tugas peradilan, perilaku Hakim, perilaku Panitera dan Pegawai, pelaksanaan administrasi perkara, pelaksanaan dan administrasi umum.

d. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan fungsi lainnya sesuai kewenangan dan undang-undang.

e. Fungsi lainnya, yakni dapat mengadakan pelayanan, penyuluhan hukum dan memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dengan cara keterbukaan dan transparansi informasi peradilan sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Dalam hal penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan membarenginya dengan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan maupun kaidah - kaidah pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, secara umum pelaksanaan manajemen peradilan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bertujuan untuk mewujudkan:

1. Tata kelola pengadilan yang baik, efektif, dan efisien.

2. Peningkatan kualitas aparaturnya pengadilan.
3. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis teknologi informasi.
4. Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya peradilan.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Militer di dasarkan pada PERMA Nomor 7 tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan dan PERMA Nomor 01 tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang perubahan atas PERMA Nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.



Organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan disusun sebagai berikut:

1. **Unsur Pimpinan:**
 - a. Kepala Pengadilan Militer
 - b. Wakil Kepala Pengadilan Militer

2. **Unsur Kepaniteraan:**
Panitera membawahi antara lain:

- a. Panitera Muda Pidana.
- b. Panitera Muda Hukum.

Serta membawahi kelompok jabatan Fungsional :

- a. Panitera Pengganti
- b. Pranata Peradilan

3. **Unsur Kesekretariatan**

Sekretariat membawahi Sub Bagian antara lain :

- a. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP).
- b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
- c. Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Serta membawahi kelompok jabatan Fungsional :

- a. Fungsional Arsiparis.
- b. Fungsional Pustakawan.
- c. Fungsional Pranata Komputer.
- d. Fungsional Bendahara.

4. Unsur Pelaksana:

- a. Jabatan Fungsional Kelompok Hakim Militer yang disingkat Pokkimmil.

Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

E. Sumber Pendanaan

1. Pengelolaan Keuangan DIPA (01) BUA MARI.

Dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang bertujuan menyempurnakan manajemen belanja Negara guna peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai salah satu instansi Pemerintah yang berada dalam lingkungan Mahkamah Agung, pada akhir tahun anggaran 2025 telah menerima "DIPA PETIKAN ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2025" dengan Nomor : SP DIPA-005.01.2.663246/2025 tanggal 02 Desember 2024 dengan PAGU sebesar Rp. 3.901.926.000,- (tiga miliar sembilan ratus satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah). Pada tanggal 11 Februari 2025 Satker Melaksanakan Revisi ke-1 yaitu Revisi Halaman III DIPA ke Kanwil Kalimantan Timur (Samarinda) pagu anggaran tetap. Pada tanggal 23 Februari 2025 satker melaksanakan Revisi ke-2 yaitu Revisi DIPA Efisiensi Belanja APBN TA 2025. Pada tanggal 23 Maret 2025 Satker telah melakukan revisi ke-3 yaitu Revisi DIPA Buka Blokir Efisiensi Belanja APBN Tahun Anggaran 2025 Kecuali Perjalanan Dinas Diblokir 50 Persen. Pada tanggal 21 April 2025 satker

melaksanakan revisi ke-4 yaitu Revisi DIPA Rencana Penarikan Dana Halaman 3 DIPA. Pada tanggal 10 Juli 2025 Satker telah melakukan revisi ke-5 yaitu Revisi DIPA Rencana Penarikan Dana Halaman 3 DIPA. Pada tanggal 22 Juli 2025 satker melakukan Revisi ke-6 Revisi DIT.PA yaitu penambahan Pagu minus. Pada tanggal 27 Agustus 2025 satker melakukan Revisi ke-7 yaitu Revisi POK dan Revisi Dipa Rencana Penarikan Dana Halaman 3 Dipa. Pada tanggal 12 September 2025 satker melakukan Revisi ke-8 yaitu Revisi POK, Revisi Halaman III Dipa, Revisi Pemutakhiran data. Pada tanggal 23 September 2025 satker melakukan Revisi ke-9 yaitu Revisi Penambahan Pagu minus. Pada tanggal 24 Oktober 2025 satker melakukan Revisi ke-10 Yaitu Revisi POK dan Revisi Halaman 3 DIPA. Pada tanggal 29 Oktober 2025 satker melakukan Revisi POK dan Pemutakhiran KPA. Pada tanggal 14 Nopember 2025 satker melakukan Revisi DIT.PA yaitu penambahan Pagu minus. Pada tanggal 26 Nopember 2026 Satker melakukan Revisi POK dan Pemutakhiran KPA.

**Alokasi Pagu dan Realisasi Anggaran Dipa (01) BUA MA RI
Pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2025**

No	Pagu DIPA semula (Rp)	Pagu DIPA setelah revisi (RP)
1.	3.901.926.000	4.666.808.000

2. Pengelolaan Keuangan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MA RI.

Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA005.05.2.663247/2025 tanggal 02 Desember 2024 pada tahun anggaran 2025 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memperoleh pagu anggaran sebesar Rp.157.085.000,- (seratus lima puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah).

No	Kegiatan	Pagu semula (RP)	Pagu setelah revisi (RP)
1.	Perkara yang dilayani sidang di luar Gedung di lingkungan Peradilan Militer (sidang di Luar Gedung Pengadilan)	53.850.000	53.850.000

2.	Perkara pidana Tingkat Pertama yang diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I-01 s.d III-18	100.310.000	71.400.000
3.	Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I-01 s.d III-18	2.925.000	2.925.000
	Total	157.085.000	128.175.000

F. Isu Strategis

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai pengadilan militer tingkat pertama memiliki peran yang sangat penting, yaitu menerima, memeriksa serta memutus perkara militer yang diberikan kepadanya mulai dari pangkat Prada sampai dengan Kapten.

Peran strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai pengadilan tingkat pertama adalah dalam hal mengadili perkara tingkat pertama di wilayah hukumnya, serta memberikan pelayanan dan penerangan/pembinaan hukum di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis dan sering menjadi sorotan masyarakat di pengadilan pada umumnya, termasuk di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah:

1. Produktifitas penyelesaian perkara.

Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dituntut untuk tidak pernah berhenti meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara. Termasuk Pengadilan Militer I-07 Balikpapan setiap tahunnya terus dipacu untuk lebih optimal dalam menyelesaikan perkara agar tidak terjadi tunggakan perkara ataupun penyelesaian perkara yang lebih dari 5 (lima) bulan.

2. Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena komitmen aparatur untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme dan melayani belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terjadi

pada badan peradilan umumnya tetapi untuk Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik pada tahun 2025 sebesar 114,45% (seratus empat belas koma empat puluh lima persen) ini sesuai dengan pencapaian kinerja satuan.

3. Putusan pengadilan dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Hal ini menimbulkan penerimaan para pencari keadilan terhadap putusan pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum tidak terjadi sampai tingkat pertama tetapi memicu para pihak melakukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

4. Manajemen penanganan perkara mulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, hingga eksekusi putusan, dalam prosesnya belum ada jaminan bahwa prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty), akuntabel dan transparan.

5. Masih dijumpai permasalahan Sumber Daya Manusia seperti masih lemahnya etos kerja, pemahaman terhadap kebijakan, penguasaan terhadap teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan nilai-nilai universal peradilan yang excellent (seperti: independency, integrity, akuntability, resposibility, transparanty, impartial,dan equality) belum sepenuhnya tertanam dan dilaksanakan oleh seluruh warga peradilan.

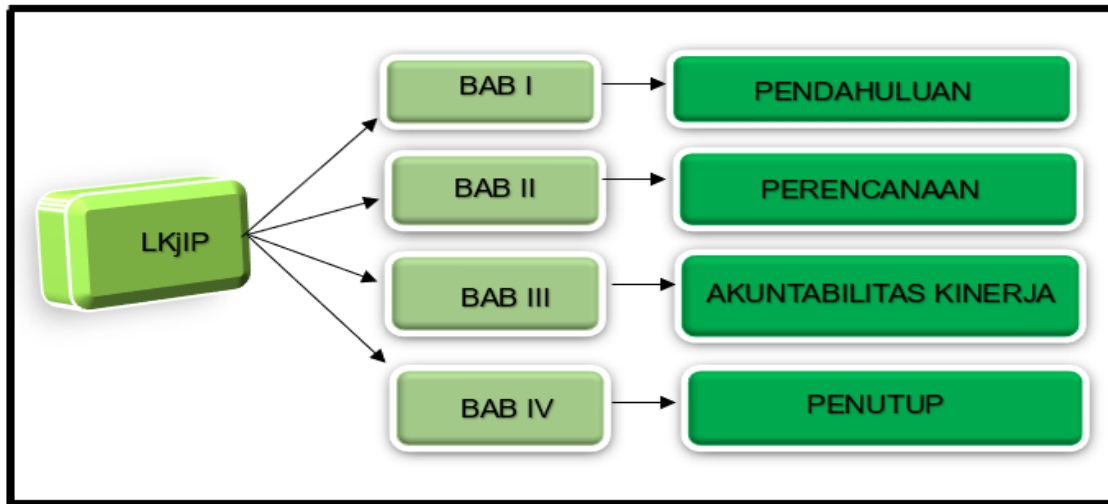
6. Permasalahan dalam fungsi pengawasan dan pengaduan, yaitu keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak para pencari keadilan yang belum memahami mekanisme pengaduan, dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.

7. Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan utama dan pendukung yang butuh penambahan dan pembaruan.

G. Sistematika Penyajian

Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2025 berpedoman pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya sebagai berikut:

Bagan Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
- B. Tindak Lanjut atas Hasil Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024
- C. Realisasi Anggaran
- Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan beserta strategis yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang hukum dan aparatur. Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2025-2029, pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (good governance), proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah dilakukan secara partisipatif antara unit satker dilingkungan hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan maupun stakeholder eksternal. Untuk memberi gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Visi, Misi dan Motto

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a. Pernyataan Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan berisikan cita - cita dan citra yang ingin diwujudkan Satuan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Adapun Visi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang Agung”

Visi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melakukan aktifitasnya. Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengandung pengertian secara kelembagaan dan organisasional sebagai berikut:

1) Pengertian secara kelembagaan:

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota dan/ atau ibu kota daerah setingkat provinsi, wilayah hukumnya termasuk Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

2) Pengertian secara organisasional:

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan wilayah hukumnya yang terdiri dari Pengadilan Militer I-07 Balikpapan itu sendiri sebagai pengadilan tingkat pertama, yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Kepala Pengadilan dan Wakil Kepala), Kelompok Hakim Militer, Panitera, Sekretaris beserta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berada dibawah Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Adapun makna perkata dari visi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut adalah :

- a) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah pelaksana badan peradilan dilingkungan peradilan militer tingkat pertama yang berkedudukan di Balikpapan yaitu di ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yang wilayah hukumnya meliputi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
- b) Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran.

b. Pernyataan Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan yaitu:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu sampai tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel.
- 2) Keterjangkauan pelayanan badan peradilan.
- 3) Keterjangkauan pelayanan badan peradilan.

c. Motto

Motto Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah: **“RADJA”**

R : Responsif

A : Akuntabel

D : Disiplin

J : Jujur

A : Adil

2. Tujuan

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 menyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*Good Governance*) diperlukan

prinsip-prinsip partisipasi, Penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme.

Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi dan perbaikan kinerja aparatur negara/pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2010 dan telah direvisi dengan Nomor Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2018 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam periode tahun 2025-2029 adalah suatu program peningkatan kinerja yang ada atau sudah berjalan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Kesekretariatan sebagai Supporting Unit untuk mendukung pelaksanaan Kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan tugas dan fungsi masing-masing bagian untuk melaksanakan pemberian dukungan dibidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM), serta Sarana dan Prasarana di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan uraian secara umum sebagai berikut :

- a. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
- b. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan Peradilan untuk mencari keadilan.
- c. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

3. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator

sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana Tingkat pencapaiannya (target) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Kemudian, dengan adanya tujuan tersebut ditetapkanlah sasaran strategis yaitu:

- a. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern
- b. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
- c. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2025–2029 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
		1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

		1.6. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative
		1.7. Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)
		1.8. Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi
		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun
		3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi
		3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun
		3.6. Indeks Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

B. Perjanjian Kinerja 2025

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja dibuat berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Adapun tujuan adanya Perjanjian Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan atau sanksi.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah membuat Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan RPJM 2025 - 2029.

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Januari s.d. Sepember Tahun 2025) Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sebelum direvisi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85%
		Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya Akses	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar	90%

	Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Gedung Pengadilan	
4.	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku	Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan	97%
		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	98%
		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan	98%

DIPA		PROGRAM	PAGU (RP)
01	Program Dukungan Manajemen		3.846.926.000
05	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		55.000.000
Total			3.901.926.000

Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Januari-September 2025) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			
		Uraian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105,3%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	92,1%	122,7%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85%	95,2%	112 %
		Index Persepsi Stakeholder	95%	91.7%	96.5%

		yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1					109,12%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 2					100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang disidangkan di luar Gedung Pengadilan	90%	100%	111%
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 3					111%
4.	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku	Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan	97%	97%	100%
		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	98%	98%	100%
		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan	98%	98%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 4					100%

Berikut adalah penjelasan dan analisis rincian capaian berdasarkan 4 Sasaran Strategis yang ada di dalam tabel:

Sasaran Strategis 1:

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Rata-rata capaian untuk sasaran ini sangat memuaskan, yaitu mencapai 109,12%.

- a. Kecepatan Penyelesaian (Sangat Baik): 100% perkara pidana militer diselesaikan tepat waktu (melampaui target 95%, capaian 105,3%).
- b. Penerimaan Putusan (Sangat Baik): Terdapat keberhasilan tinggi dalam menekan upaya hukum lanjutan. Persentase perkara yang tidak banding (92,1%) dan tidak kasasi (95,2%) melampaui target, mengindikasikan para pihak umumnya menerima putusan tingkat pertama.
- c. Area Evaluasi: Satu-satunya indikator yang capaiannya belum mencapai 100% (hanya 96,5%) adalah Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan. Targetnya adalah 95%, namun realisasinya baru 91,7%. Ini bisa menjadi area fokus untuk peningkatan layanan pelanggan/publik ke depannya.

Sasaran Strategis 2:

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Rata-rata capaian untuk sasaran ini adalah 100%.

- a. Administrasi Perkara (Tepat Sasaran): Pengadilan berhasil 100% menyampaikan salinan putusan perkara pidana militer kepada para pihak tepat pada waktunya, sesuai dengan target yang ditetapkan.

Sasaran Strategis 3:

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Rata-rata capaian untuk sasaran ini adalah 111%.

- a. Aksesibilitas (Sangat Baik): Realisasi persentase perkara yang disidangkan di luar Gedung Pengadilan mencapai 100% (dari target 90%). Ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam "menjemput bola"

atau mempermudah akses sidang bagi pihak yang mungkin terkendala jarak atau biaya.

Sasaran Strategis 4:

Terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang tertib administrasi

Rata-rata capaian untuk sasaran kesekretariatan ini adalah 100%.

a. Dukungan Internal (Tepat Sasaran): Seluruh fungsi kesekretariatan mulai dari perencanaan, kepegawaian, hingga persuratan dan perlengkapan berhasil memenuhi realisasi yang persis sama dengan target yang dipasang yaitu 98% dan Capaian keseluruhan dinilai 100%.

2. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%
		1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		1.6. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	0%

		1.7. Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	7,4%
		1.8. Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	7,4%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	80%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	85
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	95
		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun	85
		3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	80
		3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun	70
		3.6. Indeks Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	90

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran serta membandingkan capaian kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Pengukuran Kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

No	Sasaran	Indikator Kinerja			
		Uraian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori	100%	100%	100%

		putusan			
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	0%	0%	100%
		Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	7,4%	7,4%	100%
		Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	7,4%	7,4%	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	80%	91,56%	114,45%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	85	32.5	40,62%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	95	96,75	101,84%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun	85	88,83	104,50%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	80	100	125%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen	70	80,58	115.11%

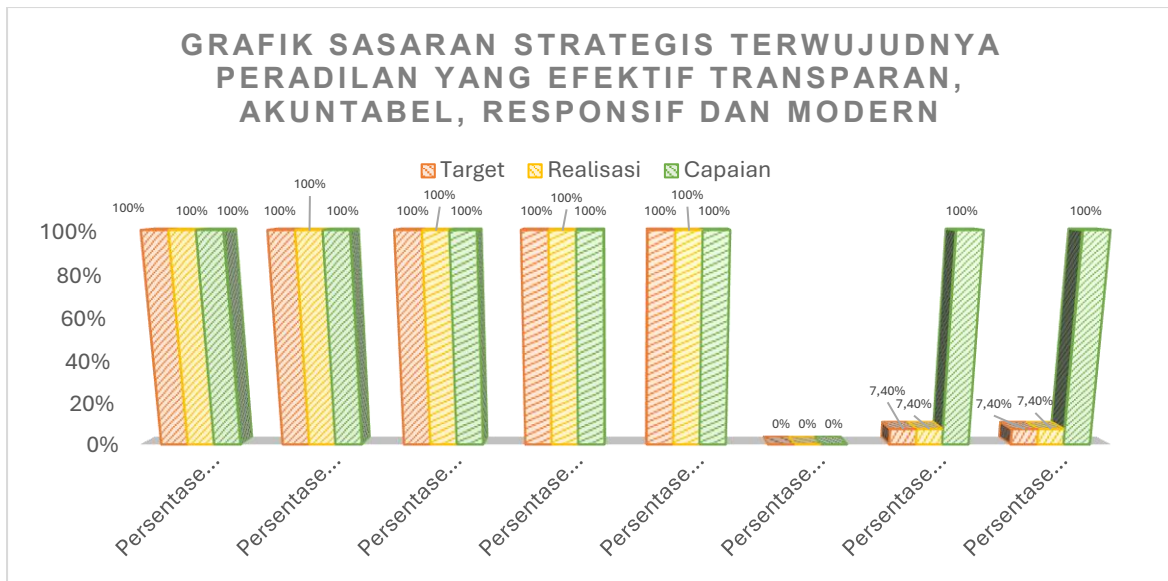
	Badilmiltun			
	Indeks Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	90	90	100%

SASARAN 1 :

Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan diukur dengan menetapkan 8 (delapan) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran teknis yudisial ini, pada tahun 2025 dapat digambarkan pada tabel dan grafik sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%
2.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
3.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
4.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
5.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
6.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	0%	0%	0%
7.	Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	7,4%	7,4%	100%
8.	Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	7,4%	7,4%	100%



Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tingkat capaian indikator kinerja persentase perkara Pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2025 telah memenuhi target. Dalam Laporan Tahunan 2025 Pengadilan I-07 Balikpapan diuraikan bahwa jumlah perkara yang ditangani sebanyak 63 perkara (Sisa tahun 2024 sebanyak 6 perkara, Perkara Pidana Kejahatan Masuk 42 perkara dan Perkara Pidana Pelanggaran Masuk 15 perkara) dan diputus 63 perkara (Perkara Pidana Kejahatan sebanyak 48 perkara dan Perkara Pidana Pelanggaran sebanyak 15 perkara). Dapat dilihat dari tabel data keadaan perkara pada tahun 2025 sebagai berikut:

Keadaan Perkara Tahun 2025

Bulan	Sisa awal	Masuk	Putus	Sisa Akhir
Januari	6	10	0	16
Februari	16	0	6	10
Maret	10	8	10	8
April	8	1	0	9
Mei	9	6	9	6
Juni	6	5	2	9
Juli	9	6	7	8

Agustus	8	11	10	12
September	12	0	7	5
Oktober	5	3	4	4
Nopember	4	3	6	1
Desember	1	1	2	0
Jumlah		54	63	

Sumber Data: Laporan Perkara Tahun 2024

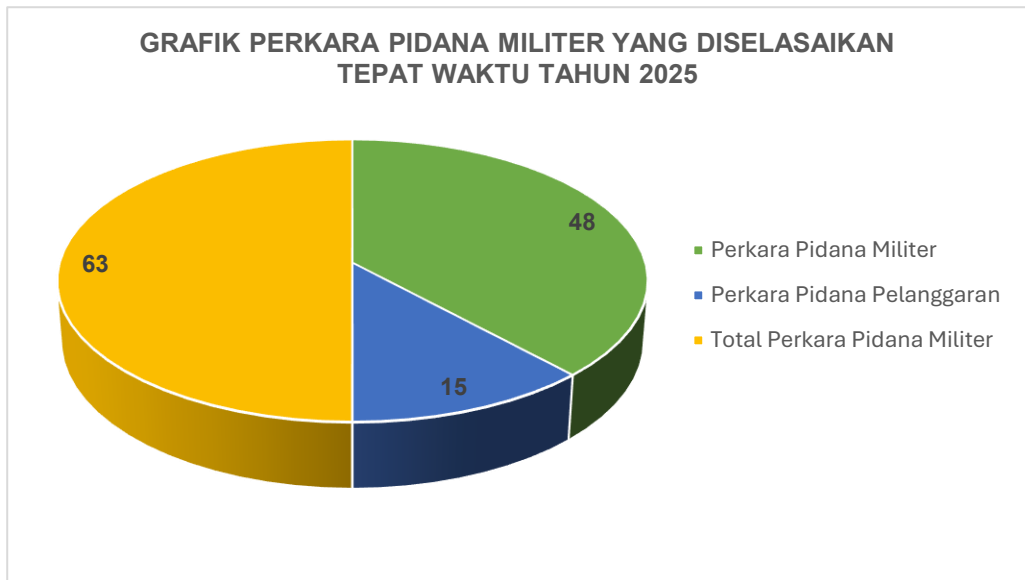
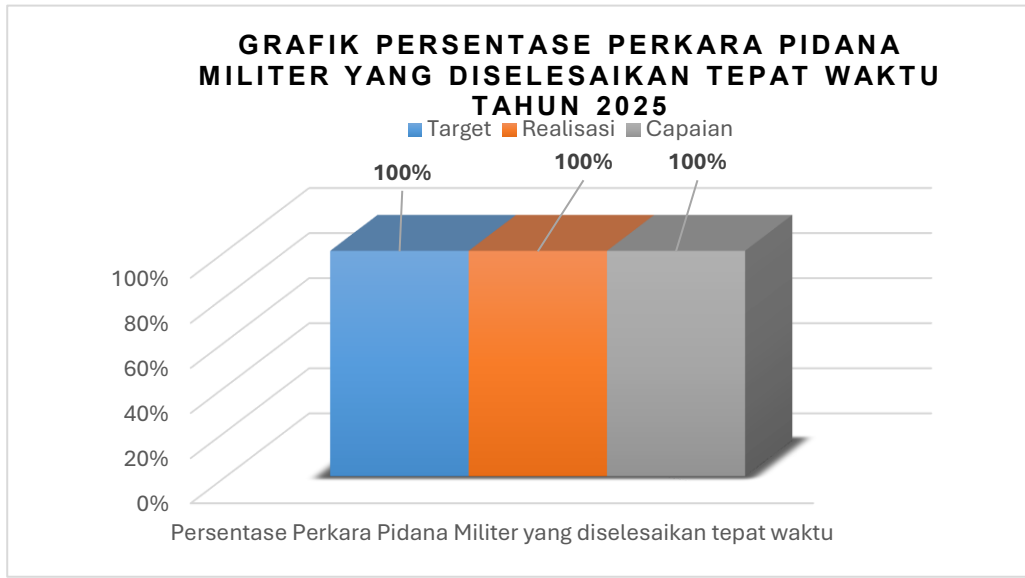
Target penyelesaian perkara tepat waktu sebesar 100% (Seratus persen) pada tahun 2025 telah terpenuhi, sedangkan jumlah perkara masuk tahun 2024 berjumlah 57 (empat puluh dua) perkara, sehingga jumlah perkara Pidana Militer yang ditangani pada tahun 2025 adalah berjumlah 63 (enam puluh tiga) perkara dan perkara Pidana Militer yang diputus sejumlah 63 (enam puluh tiga) perkara dan semuanya tepat waktu. Dengan demikian persentase realisasi penyelesaian perkara tepat waktu tahun 2025 mencapai 100% (seratus persen). Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu** pada tahun 2025 telah mencapai target tahunan dengan capaian persentase 100% (seratus persen). Berikut tabel dan grafik pencapaian target kinerjanya tahun 2025 sebagai berikut :
Berikut tabel dan grafik pencapaian target kinerjanya tahun 2025 sebagai berikut:

KEADAAN PERKARA PIDANA MILITER YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU TAHUN 2025

Jenis Perkara Pidana	Perkara yang ditangan	Perkara Yang diputus	Waktu penyelesaian perkara		Ket
			1 s.d 5 bulan	> 5 bulan	
Pidana Kejahatan	48	48	48	0	Sisa : 0 Dicabut : 0
Pidana Pelanggaran	15	15	15	0	-

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu** pada tahun 2025 dapat terpenuhi sebesar 100%. Sebagaimana terlihat pada Tabel pencapaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Persentase Perkara Pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%



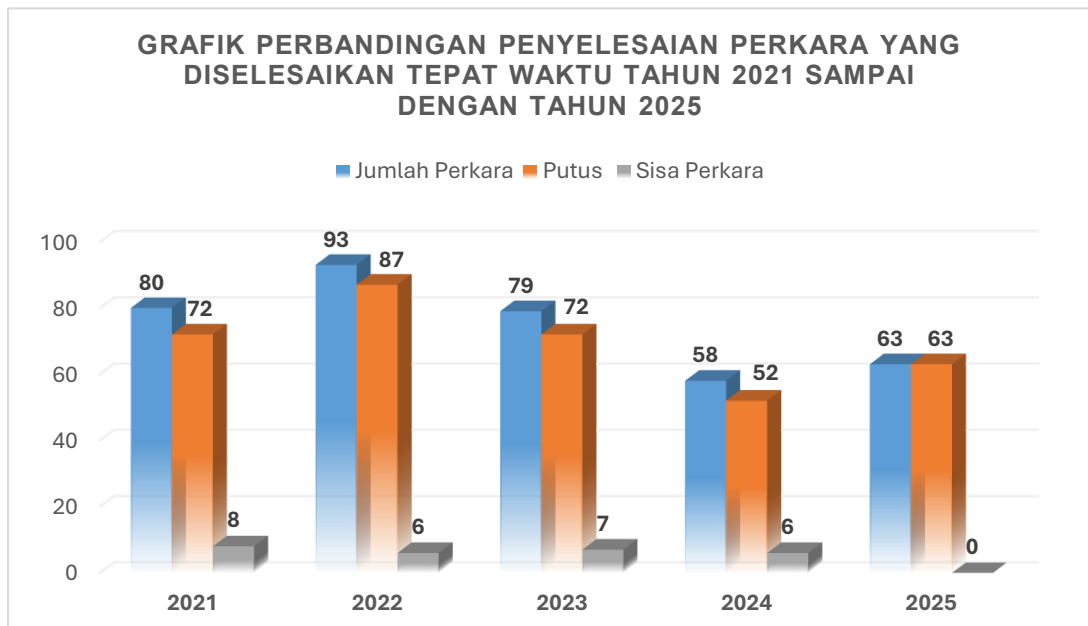
	Perkara Putus Tepat Waktu	Perkara Putus <5 bulan
Perkara Pidana Militer	48	48
Perkara Pidana Pelanggaran	15	15
Total Perkara Pidana Militer	63	63

Berdasarkan data dan penjelasan tersebut di atas, target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2025 telah tercapai dengan persentase capaian 100% (Seratus persen). Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2025 telah terpenuhi dengan target 100% (Seratus persen).

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024, 2023, 2022, dan 2021.

Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2025 berbanding sama dengan pencapaian target kinerja Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 mengalami kenaikan melebihi target yang ditentukan sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja															Keterangan
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	90%	95,74%	95%	93,55%	98,48%	95%	100%	105,3%	95%	100%	105,3%	100%	100%	100%	Pencapaian kinerja telah mencapai target 100%



	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Jumlah Beban Perkara	80	93	79	58	63
Perkara putus	72	87	72	52	63
Sisa Perkara	8	6	7	6	0

c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada indikator kinerja Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2025 telah mencapai Target Jangka Menengah (100%) dengan capaian realisasi 100% (seratus persen). Sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Keterangan
	Realisasi						
	2021	2022	2023	2024	2025		
Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu	90 %	93,55 %	100 %	100%	100%	100%	Realisasi 5 tahun = $(90\%+93,55\%+100\%+100\%+100\%) / 5 = 96,71\%$

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional (Standar Mahkamah Agung Republik Indonesia).

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2025 telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja pada indikator tersebut berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut menjadi acuan dan standar nasional bagi Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dalam penyelesaian perkara. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 Tahun 2014 tersebut disebutkan pada point 1 (satu) bahwa Penyelesaian perkara

pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2025 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung terdapat perbedaan dimana Mahkamah Agung RI hanya menetapkan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan juga menetapkan target sebesar 100%, perbandingan target dan realisasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Indikator Kinerja	Target MARI	Target Satker	Realisasi Satker	Capaian Satker	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu	96,46%	100%	100%	100%	Target tercapai Target MA

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja.

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Bahkan realisasi pencapaian kinerja tahun 2025 melebihi target jangka menengah sebesar 100% (seratus persen).

Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain:

- 1) Tidak terlepas dari Program Kadilmil dalam pelaksanaan strategi percepatan penyelesaian perkara yang tepat waktu pada tahun 2025.
- 2) Membagi beban penyelesaian perkara yang ditangani kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengganti secara proporsional.
- 3) Berpedoman kepada SOP dan peraturan yang ada dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, seperti salah satunya dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan berpedoman pada SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan

Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Tabel Penyelesaian Perkara sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

No	Tahun	1 s.d 5 bln	>5 bulan
1	2	3	4
1.	2025	63	0

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Capaian pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tidak terlepas dari efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang ada. Komposisi ketersediaan SDM bagian teknis di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2025 terdiri dari 7 (tujuh) orang Hakim Militer termasuk Plt. Kepala, 1 (satu) orang Panitera, dan 3 (tiga) orang Panitera Pengganti, sedangkan jabatan Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Pidana masih kosong.

Namun demikian pelaksanaan target kinerja penyelesaian perkara yang tepat waktu dapat terlaksana dengan baik sesuai target kinerja tahunan. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut tidak terlepas dari disiplin kerja para aparatur atau anggota Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing yang merupakan faktor penting dan pendukung terpenuhinya target kinerja tersebut

Tabel Jabatan

No	Kelompok Jabatan	Jabatan	Jumlah (Personel)	Ket.
1.	Teknis	Kepala	-	-
		Wakil Kepala	1	TNI
		Pokkimmil	7	TNI
		Panitera	1	TNI
		Panmud Pidana	-	-
		Pengadmin Hukum (Staf)	-	-
		Pengadmin Reg Perkara (Staf)	-	-
		Pengelola Perkara (Staf)	2	TNI/ASN
		Analisis Perkara Peradilan (Staf)	-	-
		Panmud Hukum	-	-
		Pengadmin Hukum (Staf)	-	-

	Pengadmin Reg Perkara (Staf)	-	-
	Pengelola Data Informasi dan Hukum (Staf)	-	-
	Dokumentalis Hukum	1	CPNS
	Panitera Pengganti	3	TNI

No	Kelompok Jabatan	Jabatan	Jumlah (Personel)	Ket.
2.	Non Teknis	Sekretaris	1	TNI
		Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	1	ASN
		Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Staf)	-	-
		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Staf)	-	-
		Pengolah Data dan Informasi (Staf)	1	ASN (BP Ke Dilmil II-09 Bandung)
		Penata Layanan Operasional Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	1	PPPK
		Kasubbag Umum dan Keuangan	-	-
		Penyusun Laporan Keuangan (Staf)	-	-
		Bendahara (Staf)	1	ASN
		Pengelola daftar gaji	-	-
		Pengadministrasian Keuangan	1	ASN (Pit. Kasubbag Umum dan Keuangan)
		Pengelola Barang Milik Negara (Staf)	-	-
		Pranata Barang dan Jasa (Staf)	-	-
		Pranata Kearsipan (Staf)	-	-
		Pengadmin Persuratan (Staf)	-	-
		Pengadmin Pustakawan (Staf)	-	-
		Teknisi Sarana dan Prasarana (Staf)	-	-
		Ajudan (Staf)	-	-
		Pengemudi (Staf)	-	-
		Penata Layanan Operasional Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	PPPK
		Operator Layanan Operasional Sub Bagian Umum dan Keuangan	2	PPPK
		Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	ASN
		Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur (Staf)	1	ASN
		Analisis Kepegawaian	-	-
		Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Staf)	-	-
		Pengelola Kepegawaian (Staf)	-	-
		Penata Layanan Operasional Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	PPPK
		Operator Layanan Operasional Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	PPPK

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berkomitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima diantaranya diaplikasi dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Dengan usaha dan kerja keras dari seluruh aparatur dan komitmen yang kuat dari seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan untuk mendapatkan WBK. Semoga Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun yang akan datang dapat mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), walaupun Pengadilan Militer I-07 Balikpapan belum memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tetapi seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bertekad dan berkomitmen untuk mewujudkannya serta selalu menjaga integritas.

Beberapa program kerja yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain:

- 1) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
- 2) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
- 3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- 4) Rapat bulanan sebagai media pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja oleh Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terhadap seluruh bagian.
- 5) Pengawasan setiap Triwulan oleh Hakim Pengawas Bidang yang telah ditunjuk berdasarkan Kep Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- 6) Mengikuti seluruh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada tahun 2025 telah memenuhi target 100%. Pencapaian target indikator kinerja ini dapat dijelaskan bahwa berkas perkara yang putus sejumlah 63 (enam puluh tiga) perkara telah dikirimkan salinan putusan ke para pihak tepat waktu. Sebagaimana tabel berikut ini :

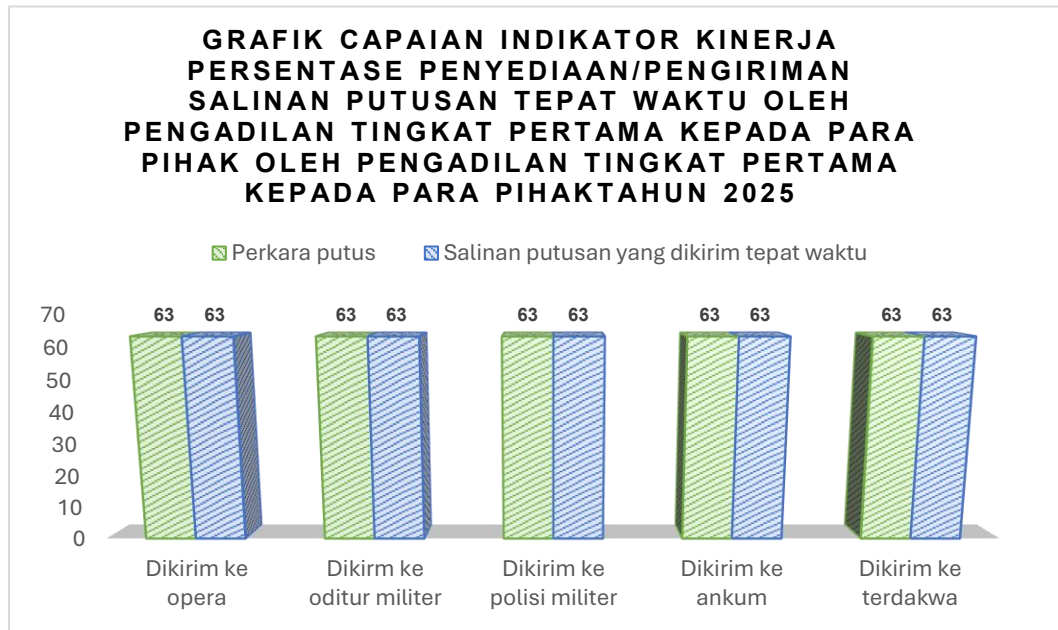
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%

Berikut tabel capaian indikator kinerja pada persentase salinan putusan yang disampaikan kepada Papera, Oditur Militer, Polisi Militer, Anikum dan kepada Terdakwa tepat waktu pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bulan	Putus	Salinan Putusan yang dikirim ke Para Pihak tepat waktu	Keterangan
1	2	3	4
Januari	0	0	-
Februari	6	6	-
Maret	10	10	-
April	0	0	-
Mei	9	9	-
Juni	2	2	-
Juli	7	7	-
Agustus	10	10	-
September	7	7	-
Oktober	4	4	-
Nopember	6	6	-
Desember	2	2	-
Jumlah	63	63	

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat capaian indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada tahun 2025 telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Adapun capaian indikator kinerja tersebut dapat di lihat pada grafik sebagai berikut:



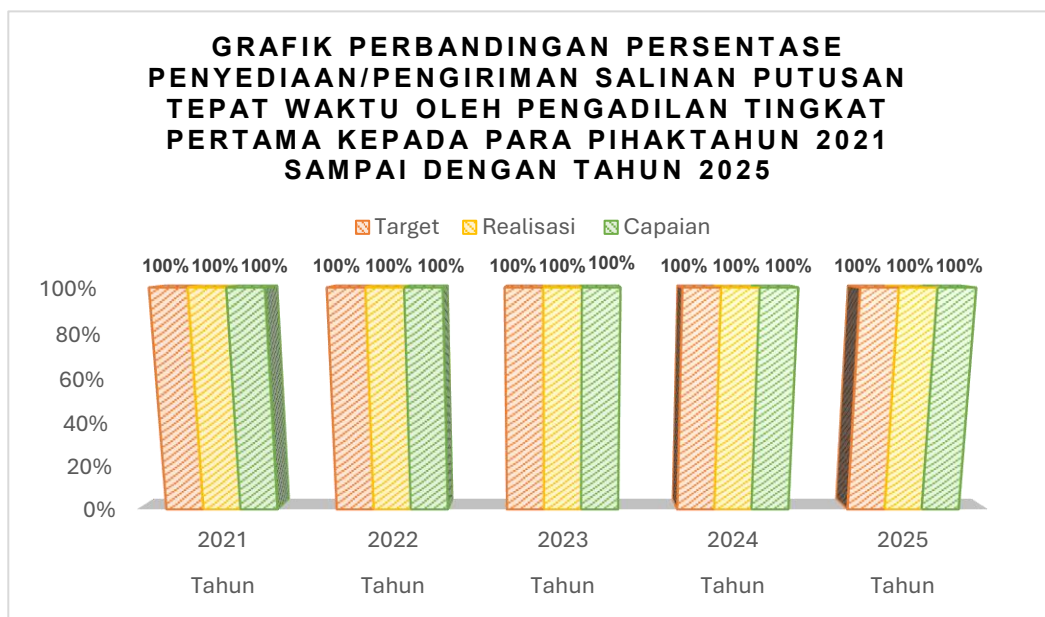
	Perkara putus	penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu
Dikirim ke opera	63	63
Dikirm ke oditur militer	63	63
Dikirim ke polisi militer	63	63
Dikirim ke ankum	63	63
Dikirim ke terdakwa	63	63

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Capaian indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tahun 2025 berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang di kirim para pihak tepat waktu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 yakni sebesar 100% (seratus persen).

Adapun perbandingannya dapat di lihat pada tabel dan grafik berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja (Realisasi)					Kenaikan/ Penurunan
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	Tetap



	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perbandingan realisasi pencapaian target kinerja sampai dengan tahun 2025 pada indikator kinerja **Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak** dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Keterangan
	Realisasi						
	2020	2021	2022	2023	2025		
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	Realisasi 5 tahun = (100%+100%+100% + 100%+100%) /5 = 100%

r

realisasi target kinerja pada indikator kinerja Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada tahun 2025 tercapai sesuai target jangka menengah yang telah ditetapkan. Atas dasar capaian tersebut diharapkan persentase target jangka menengah sebesar 100% akan tetap bisa tercapai pada tahun yang akan datang.

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional.

Capaian pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2025 berpedoman pada standar nasional yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, pada point 2 (dua) dinyatakan bahwa “untuk perkara Pidana Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHP”. Dengan demikian target kinerja pada indikator kinerja persentase salinan putusan

yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2025 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI terdapat perbedaan dimana Mahkamah Agung RI hanya menetapkan target pada tahun 2025 sebesar 85% sedangkan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan target maksimal yakni sebesar 100%, perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada tabel berikut ini:

No	Indikator Kinerja	Target MARI	Target Satker	Realisasi Satker	Capaian Satker	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	85%	100%	100%	100%	Target Satker tercapai

e. Analisis Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Capaian pada indikator kinerja Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak tidak terlepas dari perwujudan dan penyelesaian perkara tepat waktu dan publikasi perkara (*one day publish*) sehingga setelah Majelis Hakim membacakan putusannya diikuti dengan kesiapan produk putusan tersebut berupa petikan putusan dan salinan putusan untuk disampaikan kepada para pihak yaitu Papera (Perwira penyerah perkara), Oditur Militer, Polisi Militer, Anjum (Atasan yang berhak menghukum) dan Terdakwa sesuai dengan SOP dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Hakim dan Panitera sebagai tenaga teknis Pengadilan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah secara maksimal menghasilkan produk putusan berkualitas dan berkeadilan sesuai penerapan dalam KUHP dan KUHPM serta penerapan Hukum Acara Pidana di dalam persidangan tingkat pertama. Ketika putusan akhir selesai dibacakan, bagian Kepaniteraan dapat langsung memproses administrasi penyelesaian perkara sesuai SOP yang ada sehingga penyampaian salinan putusan kepada para pihak dapat terlaksana tepat waktu.

Pencapaian indikator kinerja Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak dengan capaian 100% (seratus persen) pada tahun 2021 sampai dengan 2025 menunjukkan Aparatur Teknis dan Non Teknis pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan konsisten dalam pelaksanaan indikator kinerja tersebut berpedoman pada SEMA Nomor 01 Tahun 2011.

Selain itu disiplin kerja para aparatur atau anggota Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bagian merupakan faktor penting dan pendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Capaian pada indikator kinerja **Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak** tidak terlepas dari efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Komposisi ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) bagian teknis di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2025 hanya terdiri dari 7 (tujuh) orang Hakim Militer termasuk Plt. Kepala, 1 (satu) orang Panitera, dan 3 (tiga) orang Panitera Pengganti, sedangkan jabatan Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Pidana masih kosong.

Namun demikian Sumber Daya Manusia (SDM) Hakim dan Panitera yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dengan pembagian tugas secara proporsional, Plt. Kadilmil juga melaksanakan persidangan sesuai komposisi Majelis Hakim yang tersedia di unit kerja. Dengan komposisi tenaga teknis tersebut pada tahun 2025 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat menyelesaikan dan memutus semua perkara yang ditangani sebanyak 63 (enam puluh tiga).

Capaian indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tersebut tidak terlepas pula dukungan kinerja para staf baik pada bagian Kepaniteraan maupun pada bagian Kesekretariatan. Semua staf melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan beban kerja yang ada dan dilaksanakan sesuai

SOP dan aturan yang ada. Sehingga semua beban kerja dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) tidak menjadi halangan bagi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelesaian perkara dan tugas-tugas administrasi lainnya. Semua beban kerja dapat dibagi habis kepada Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang tersedia.

Selain dukungan kinerja dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di unit kerja, capaian indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu juga di dukung oleh ketersediaan pagu anggaran pada DIPA (05) Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI khusus untuk pengiriman petikan dan salinan putusan kepada para pihak. Dengan dukungan anggaran tersebut pemenuhan target kinerja pada indikator persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu akan terealisasi sesuai target tahunan yang telah ditetapkan.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun 2025 telah melaksanakan Beberapa program kerja yang secara tidak langsung mendukung capaian pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tahun 2025 antara lain:

- 1) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
- 2) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
- 3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- 4) Rapat bulanan sebagai media pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja oleh Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terhadap seluruh bagian.

- 5) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dilaksanakan per triwulan.
- 6) Mengikuti seluruh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

3. **Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak**

a. **Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2025 telah memenuhi target 100%. Pencapaian target indikator kinerja ini dapat dijelaskan bahwa berkas pemberitahuan banding sejumlah 4 (empat), kasasi sejumlah 1 (satu) dan PK 0 (nol) perkara telah dikirimkan para pihak oleh pengadilan pengaju tepat waktu. Sebagaimana tabel berikut ini:

	Banding	Kasasi	PK	Jumlah
Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat Banding, Kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	4	1	0	5
Jumlah petikan/amar putusan Banding, Kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	4	1	0	5

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak** pada tahun 2025 dapat terpenuhi sebesar 100%. Sebagaimana terlihat pada Tabel pencapaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Realisasi kinerja atas persentase pengiriman pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu pada tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena indikator ini merupakan parameter baru yang ditetapkan dalam IKU tahun berjalan. Pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 serta SEMA Nomor 1 Tahun 2014 yang mewajibkan pengadilan pengaju untuk segera menyampaikan amar putusan kepada para pihak guna menjamin kepastian hukum. Tidak adanya data pembanding historis menjadikan capaian tahun 2025 sebagai baseline atau nilai dasar untuk mengukur tren efektivitas pengiriman dokumen di masa mendatang.

Adapun perbandingannya dapat di lihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja (Realisasi)					Kenaikan/ Penurunan
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	-	-	-	-	100%	-

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Realisasi capaian pengiriman pemberitahuan petikan dan amar putusan pada tahun 2025 menjadi fondasi krusial dalam mengukur deviasi terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satker. Mengingat indikator ini baru ditetapkan, nilai realisasi saat ini berfungsi sebagai starting point untuk mengevaluasi efektivitas sistem manajemen perkara dalam mencapai target akhir periode perencanaan strategis. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, analisis ini diarahkan untuk memastikan bahwa tren kepatuhan pengiriman tepat waktu tetap berada pada jalur yang konsisten guna mendukung tercapainya visi peradilan yang modern dan transparan. Dengan demikian, meskipun data historis belum tersedia, pencapaian tahun 2025 memberikan gambaran kapasitas organisasi dalam memenuhi janji kinerja jangka panjang yang telah ditetapkan.

Perbandingan realisasi pencapaian target kinerja sampai dengan tahun 2025 pada indikator kinerja Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Keterangan
	Realisasi						
	2021	2022	2023	2024	2025		
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	-	-	-	-	100%	100%	-

Pencapaian realisasi target kinerja pada indikator kinerja Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada tahun 2025 tercapai sesuai target jangka menengah yang telah ditetapkan. Atas dasar capaian tersebut diharapkan persentase target jangka menengah sebesar 100% akan tetap bisa tercapai pada tahun yang akan datang.

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional.

Realisasi persentase pengiriman pemberitahuan petikan atau amar putusan upaya hukum pada tahun ini telah memenuhi standar nasional dengan capaian yang optimal dibandingkan target yang ditetapkan. Kinerja positif ini menunjukkan bahwa proses administrasi penyampaian relaas pemberitahuan putusan kepada para pihak telah berjalan responsif dan akurat sesuai tenggat waktu. Acuan standar nasional yang digunakan dalam indikator ini berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Pedoman Penerapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Peradilan. Regulasi tersebut mengamanatkan agar pengadilan pengaju segera menyampaikan pemberitahuan putusan banding, kasasi, maupun PK sesaat setelah berkas diterima demi menjamin kepastian hukum. Kepatuhan terhadap standar waktu nasional ini sangat krusial karena keterlambatan penyampaian dapat menghambat hak para pihak untuk melakukan upaya hukum lanjutan atau eksekusi. Dengan demikian, keselarasan antara realisasi kinerja dan standar nasional ini membuktikan komitmen satuan kerja dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Dengan demikian target kinerja pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2025 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI terdapat perbedaan dimana Mahkamah Agung RI hanya menetapkan target pada tahun 2025 sebesar 66% sedangkan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan target

maksimal yakni sebesar 100%, perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada tabel berikut ini:

No	Indikator Kinerja	Target MARI	Target Satker	Realisasi Satker	Capaian Satker	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	99,01%	100%	100%	100%	Target Satker tercapai

e. Analisis Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada indikator ini secara signifikan didorong oleh optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang selaras dengan SK KMA Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Mahkamah Agung. Implementasi fitur monitoring pada SIPP memungkinkan petugas mendeteksi penerimaan berkas putusan secara real-time, menjamin transparansi dan akuntabilitas data. Selain itu, peningkatan disiplin aparatur dalam mematuhi tenggat waktu penyelesaian administrasi didasarkan pada SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, yang mengamanatkan ketepatan waktu dalam setiap tahapan penanganan perkara. Sinergitas internal antara Kepaniteraan Hukum dan Jurusita juga berjalan efektif di bawah mekanisme Pengawasan Melekat (Waskat) sesuai PERMA Nomor 8 Tahun 2016, yang memastikan pimpinan memonitor langsung setiap potensi keterlambatan penyampaian relaas guna mencegah terjadinya penyimpangan kinerja.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Capaian pada indikator kinerja **Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak** tidak terlepas dari efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang

ada. Komposisi ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) bagian teknis di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2025 hanya terdiri dari 7 (tujuh) orang Hakim Militer termasuk Plt. Kepala, 1 (satu) orang Panitera, dan 3 (tiga) orang Penitera Pengganti, sedangkan jabatan Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Pidana masih kosong.

Namun demikian Sumber Daya Manusia (SDM) Hakim dan Panitera yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dengan pembagian tugas secara proporsional, Plt. Kadilmil juga melaksanakan persidangan sesuai komposisi Majelis Hakim yang tersedia di unit kerja. Dengan komposisi tenaga teknis tersebut pada tahun 2025 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat menyelesaikan dan memutus semua perkara yang ditangani sebanyak 63 (enam puluh tiga).

Capaian indikator kinerja Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tepat waktu tersebut tidak terlepas pula dukungan kinerja para staf baik pada bagian Kepaniteraan maupun pada bagian Kesekretariatan. Semua staf melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan beban kerja yang ada dan dilaksanakan sesuai SOP dan aturan yang ada. Sehingga semua beban kerja dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) tidak menjadi halangan bagi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelesaian perkara dan tugas-tugas administrasi lainnya. Semua beban kerja dapat dibagi habis kepada Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang tersedia.

Selain dukungan kinerja dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di unit kerja, capaian indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu juga di dukung oleh ketersediaan pagu anggaran pada DIPA (05) Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI khusus untuk pengiriman petikan dan salinan putusan kepada para pihak. Dengan dukungan anggaran tersebut pemenuhan target kinerja pada indikator Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK

secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tepat waktu akan terealisasi sesuai target tahunan yang telah ditetapkan.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun 2025 telah melaksanakan Beberapa program kerja yang secara tidak langsung mendukung capaian pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tahun 2025 antara lain:

- 1) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
- 2) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
- 3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- 4) Rapat bulanan sebagai media pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja oleh Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terhadap seluruh bagian.
- 5) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dilaksanakan per triwulan.
- 6) Mengikuti seluruh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tingkat capaian indikator Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada tahun 2025 telah memenuhi target 100%. Pencapaian target indikator kinerja ini dapat dijelaskan bahwa berkas salinan putusan banding sejumlah 4 (empat),

kasasi sejumlah 1 (satu) dan PK 0 (nol) perkara telah dikirimkan para pihak oleh pengadilan pengaju tepat waktu. Sebagaimana tabel berikut ini:

	Banding	Kasasi	PK	Jumlah
Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu	4	1	0	5
Jumlah salinan putusan Banding, Kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	4	1	0	5

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak** pada tahun 2025 dapat terpenuhi sebesar 100%. Sebagaimana terlihat pada Tabel pencapaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Realisasi kinerja tahun 2025 untuk indikator persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana militer tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu belum dapat diperbandingkan dengan capaian tahun lalu maupun beberapa tahun terakhir karena indikator ini baru ditetapkan secara spesifik dalam IKU tahun 2025. Pengukuran indikator ini dilaksanakan dengan memedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2014 yang mewajibkan pengadilan pengaju untuk mengirimkan dokumen putusan lengkap kepada para pihak dalam tenggang waktu yang ditentukan demi kepastian hukum. Ketiadaan data

historis menempatkan capaian tahun ini sebagai data dasar (*baseline*) yang krusial untuk memetakan standar kecepatan administrasi perkara di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada periode mendatang. Dengan demikian, analisis saat ini difokuskan pada pembentukan sistem monitoring yang efektif untuk memastikan kepatuhan pengiriman putusan sebagai bentuk akuntabilitas pelayanan peradilan.

Adapun perbandingannya dapat di lihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja (Realisasi)					Kenaikan/ Penurunan
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	-	-	-	-	100%	Tetap

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Realisasi kinerja tahun 2025 pada indikator pengiriman salinan putusan perkara pidana militer secara tepat waktu telah memberikan kontribusi signifikan sebagai langkah awal pencapaian target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Mengingat indikator ini baru diterapkan, capaian tahun ini berfungsi sebagai milestone krusial untuk memastikan bahwa peta jalan modernisasi layanan peradilan berjalan on track sesuai amanat Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Penetapan Kinerja. Kepatuhan terhadap tenggat waktu pengiriman salinan putusan pada tahun pertama ini menjadi indikator prediktif bahwa organisasi memiliki kapasitas sumber daya yang memadai untuk merealisasikan sasaran strategis "Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel" hingga akhir periode perencanaan. Oleh karena itu, keberhasilan capaian 2025 ini

menjadi modal dasar (*baseline*) yang optimis untuk mempertahankan tren positif guna memenuhi target akhir Renstra secara konsisten.

Perbandingan realisasi pencapaian target kinerja sampai dengan tahun 2025 pada indikator kinerja Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Keterangan
	Realisasi						
	2021	2022	2023	2024	2025		
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	-	-	-	-	100%	100%	-

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional.

Realisasi kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana militer tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali pada tahun ini telah memenuhi target yang ditetapkan dan sepenuhnya selaras dengan standar nasional percepatan administrasi perkara. Capaian positif ini mencerminkan efektivitas manajemen kepaniteraan dalam mendistribusikan dokumen hukum secara akurat kepada Terdakwa maupun Oditur Militer segera setelah berkas diterima dari pengadilan tingkat lanjut. Standar ketepatan waktu ini mengacu secara ketat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Regulasi tersebut mewajibkan pengadilan pengaju untuk segera menyerahkan

salinan putusan kepada para pihak sebagai bentuk transparansi dan jaminan kepastian hukum. Kepatuhan terhadap standar nasional ini sangat krusial guna mencegah keterlambatan eksekusi pidana atau terhalangnya hak para pihak dalam menempuh upaya hukum lanjutan akibat ketidaktahuan isi putusan. Dengan demikian, konsistensi kinerja ini membuktikan komitmen satuan kerja dalam menegakkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan di lingkungan peradilan militer.

Dengan demikian target kinerja pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2025 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI terdapat perbedaan dimana Mahkamah Agung RI hanya menetapkan target pada tahun 2025 sebesar 90,69% sedangkan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan target maksimal yakni sebesar 100%, perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada tabel berikut ini:

No	Indikator Kinerja	Target MARI	Target Satker	Realisasi Satker	Capaian Satker	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90,69%	100%	100%	100%	Target Satker tercapai

e. Analisis Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Pencapaian target kinerja yang optimal pada indikator ini merupakan hasil langsung dari implementasi manajemen administrasi perkara yang responsif dan berbasis teknologi informasi. Faktor keberhasilan utamanya didorong oleh optimalisasi pemanfaatan fitur monitoring pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sesuai dengan SK KMA Nomor 269/KMA/SK/XII/2018, yang memungkinkan petugas meja upaya hukum mendeteksi secara real-time status putusan banding, kasasi, atau peninjauan kembali yang telah diputus oleh pengadilan tingkat atas. Hal

ini secara signifikan memangkas waktu tunggu administrasi, sehingga penyiapan salinan putusan kepada Oditur Militer maupun Terdakwa dapat dilakukan segera. Selain itu, sinergitas koordinasi yang solid antara Pengadilan dengan Oditurat Militer dalam pertukaran informasi perkara turut meminimalisir hambatan birokrasi. Kinerja ini juga mencerminkan tingginya kepatuhan aparaturnya terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, khususnya Pasal 194 ayat (1), yang mewajibkan Panitera untuk segera memberitahukan isi putusan kepada Terdakwa dan Oditur demi menjamin kepastian hukum serta hak-hak Terdakwa dalam mempersiapkan langkah hukum selanjutnya.

Meskipun target kinerja telah tercapai, satuan kerja tetap menerapkan berbagai langkah strategis dan antisipatif (alternatif solusi) guna mempertahankan konsistensi layanan di tengah dinamika tugas operasional. Solusi konkret yang telah dilaksanakan meliputi penerapan mekanisme "Jemput Bola" administrasi, di mana salinan putusan yang diterima dari tingkat banding/agung langsung diproses dan didistribusikan pada hari yang sama (One Day Service) kepada Oditur Militer setempat tanpa menunggu akumulasi berkas, selaras dengan semangat efisiensi dalam SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012. Terhadap kendala geografis, seperti Terdakwa yang dimutasi ke kesatuan luar wilayah atau ditahan di wilayah lain, percepatan penyampaian dilakukan melalui mekanisme bantuan delegasi (tabayyun) yang berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 2014. Pengiriman surat delegasi ini diperkuat dengan komunikasi awal melalui sarana digital (telepon/pesan singkat) kepada kesatuan atau pengadilan tujuan, guna memastikan keberadaan penerima sebelum dokumen fisik dikirimkan, sehingga risiko kegagalan penyampaian (retur) dapat diminimalisir secara efektif.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Capaian pada indikator kinerja **Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak** tidak

terlepas dari efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Komposisi ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) bagian teknis di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2025 hanya terdiri dari 7 (tujuh) orang Hakim Militer termasuk Plt. Kepala, 1 (satu) orang Panitera, dan 3 (tiga) orang Penitera Pengganti, sedangkan jabatan Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Pidana masih kosong.

Namun demikian Sumber Daya Manusia (SDM) Hakim dan Panitera yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dengan pembagian tugas secara proporsional, Plt. Kadilmil juga melaksanakan persidangan sesuai komposisi Majelis Hakim yang tersedia di unit kerja. Dengan komposisi tenaga teknis tersebut pada tahun 2025 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat menyelesaikan dan memutus semua perkara yang ditangani sebanyak 63 (enam puluh tiga).

Capaian indikator kinerja Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tepat waktu tersebut tidak terlepas pula dukungan kinerja para staf baik pada bagian Kepaniteraan maupun pada bagian Kesekretariatan. Semua staf melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan beban kerja yang ada dan dilaksanakan sesuai SOP dan aturan yang ada. Sehingga semua beban kerja dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) tidak menjadi halangan bagi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelesaian perkara dan tugas-tugas administrasi lainnya. Semua beban kerja dapat dibagi habis kepada Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang tersedia.

Selain dukungan kinerja dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di unit kerja, capaian indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu juga di dukung oleh ketersediaan pagu anggaran pada DIPA (05) Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI khusus untuk pengiriman petikan dan salinan putusan kepada para pihak. Dengan dukungan anggaran tersebut pemenuhan target kinerja pada Persentase pengiriman salinan putusan

perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tepat waktu akan terealisasi sesuai target tahunan yang telah ditetapkan.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun 2025 telah melaksanakan Beberapa program kerja yang secara tidak langsung mendukung capaian pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tahun 2025 antara lain:

- 1) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
- 2) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
- 3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- 4) Rapat bulanan sebagai media pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja oleh Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terhadap seluruh bagian.
- 5) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dilaksanakan per triwulan.
- 6) Mengikuti seluruh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 menunjukkan capaian optimal sebesar 100% untuk indikator persentase putusan yang diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Realisasi yang memenuhi target ini membuktikan komitmen penuh satuan kerja dalam menjamin keterbukaan informasi publik secara transparan

dan akuntabel sesuai dengan prinsip open justice. Pelaksanaan kinerja ini berpedoman pada SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, yang mewajibkan publikasi putusan sebagai bentuk pertanggungjawaban yudisial kepada masyarakat. Dengan demikian, seluruh putusan yang telah dibacakan telah terdigitalisasi dan dapat diakses masyarakat luas guna mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi.

	Kejahatan	Pelanggaran	Jumlah
Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan	48	15	63
Jumlah putusan yang telah diminutasi	48	15	63

sarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan** pada tahun 2025 dapat terpenuhi sebesar 100%. Sebagaimana terlihat pada Tabel pencapaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Realisasi kinerja persentase putusan yang diunggah pada direktori putusan tahun 2025 belum dapat diperbandingkan dengan tahun lalu maupun beberapa tahun terakhir karena indikator ini baru ditetapkan sebagai target spesifik dalam IKU tahun 2025. Pengukuran kinerja ini didasarkan pada amanat SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan yang mewajibkan publikasi seluruh putusan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas peradilan kepada masyarakat. Oleh karena itu, capaian

tahun ini diposisikan sebagai data dasar (*baseline*) untuk mengevaluasi tren kepatuhan pengunggahan putusan dan efektivitas pengelolaan informasi perkara pada periode pelaporan mendatang. Ketiadaan data historis ini menjadi titik tolak bagi satuan kerja untuk membangun standar layanan informasi yang transparan melalui aksesibilitas dokumen hukum yang cepat di Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Adapun perbandingannya dapat di lihat pada tabel dan grafik berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja (Realisasi)					Kenaikan/ Penurunan
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	-	-	-	-	100%	-

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Realisasi kinerja tahun 2025 pada indikator persentase putusan yang diunggah ke Direktori Putusan telah memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis jangka menengah organisasi, khususnya dalam mewujudkan peradilan yang transparan dan akuntabel.

Perbandingan realisasi pencapaian target kinerja sampai dengan tahun 2025 pada indikator kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Keterangan
	Realisasi						
	2021	2022	2023	2024	2025		
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	-	-	-	-	100%	100%	-

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional.

Capaian realisasi pengunggahan putusan ke dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung pada tahun ini telah memenuhi standar nasional sebesar 100% sesuai target yang ditetapkan. Kinerja ini menunjukkan kepatuhan penuh satuan kerja dalam mengimplementasikan prinsip transparansi peradilan dan keterbukaan informasi publik. Standar nasional tersebut mengacu secara ketat pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, yang mewajibkan publikasi seluruh putusan yang telah diminutasi. Dengan demikian, keselarasan antara realisasi dan standar nasional ini menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk mengakses produk hukum secara mudah, cepat, dan akuntabel.

Dengan demikian target kinerja pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2025 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI terdapat perbedaan dimana Mahkamah Agung RI hanya menetapkan target pada tahun 2025 sebesar 85% sedangkan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan target maksimal yakni sebesar 100%, perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada tabel berikut ini:

No	Indikator Kinerja	Target MARI	Target Satker	Realisasi Satker	Capaian Satker	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	85%	100%	100%	100%	Target Satker tercapai

e. Analisis Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Keberhasilan pencapaian target kinerja ini didukung secara signifikan oleh kedisiplinan operator SIPP dalam melakukan digitalisasi dan pengunggahan dokumen putusan segera setelah proses minutasi selesai. Penerapan mekanisme kontrol berjenjang oleh Panitia Muda

Hukum memastikan setiap putusan yang telah dibacakan terunggah lengkap tanpa terkecuali ke dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung. Langkah strategis ini merupakan implementasi nyata dari SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, yang mewajibkan pengadilan menyediakan informasi putusan yang mudah diakses oleh publik sebagai bentuk akuntabilitas yudisial. Sinergitas antara Majelis Hakim yang segera menyerahkan softcopy putusan dan kesigapan staf kepaniteraan menjadi kunci utama terciptanya nol tunggakan (*zero backlog*) pada indikator ini.

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Keterangan
	Realisasi						
	2021	2022	2023	2024	2025		
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	-	-	-	-	100%	100%	-

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Capaian pada indikator kinerja **Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan** tidak terlepas dari efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Komposisi ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) bagian teknis di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2025 hanya terdiri dari 7 (tujuh) orang Hakim Militer termasuk Plt. Kepala, 1 (satu) orang Panitera, dan 3 (tiga) orang Penitera Pengganti, sedangkan jabatan Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Pidana masih kosong.

Namun demikian Sumber Daya Manusia (SDM) Hakim dan Panitera yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dengan pembagian tugas secara proporsional, Kadilmil juga melaksanakan persidangan sesuai komposisi Majelis Hakim yang tersedia di unit kerja. Dengan komposisi tenaga teknis tersebut pada tahun 2025 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat menyelesaikan dan memutus semua perkara yang ditangani sebanyak 63 (enam puluh tiga).

Capaian indikator kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan tepat waktu tersebut tidak terlepas pula dukungan kinerja para staf baik pada bagian Kepaniteraan maupun pada bagian Kesekretariatan. Semua staf melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan beban kerja yang ada dan dilaksanakan sesuai SOP dan aturan yang ada. Sehingga semua beban kerja dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) tidak menjadi halangan bagi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelesaian perkara dan tugas-tugas administrasi lainnya. Semua beban kerja dapat dibagi habis kepada Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang tersedia.

Selain dukungan kinerja dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di unit kerja, capaian indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu juga di dukung oleh ketersediaan pagu anggaran pada DIPA (05) Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI khusus untuk putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan. Dengan dukungan anggaran tersebut pemenuhan target kinerja pada Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan akan terealisasi sesuai target tahunan yang telah ditetapkan.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun 2025 telah melaksanakan Beberapa program kerja yang secara tidak langsung mendukung capaian pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tahun 2025 antara lain:

- 1) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
- 2) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.

- 3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- 4) Rapat bulanan sebagai media pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja oleh Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terhadap seluruh bagian.
- 5) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dilaksanakan per triwulan.
- 6) Mengikuti seluruh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

6. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025, realisasi capaian kinerja untuk indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) tercatat sebesar 0 perkara karena tidak ada satupun perkara yang diselesaikan dengan metode tersebut. Ketiadaan capaian ini terjadi karena sepanjang tahun berjalan tidak terdapat perkara tindak pidana di lingkungan militer yang memenuhi kualifikasi serta syarat formil dan materil untuk dilakukannya upaya perdamaian. Walaupun realisasi tahun ini nihil, pengadilan militer tetap memegang komitmen penegakan hukum yang humanis dan siap menerapkan pendekatan pemulihan tersebut pada perkara-perkara yang relevan di masa mendatang. Adapun landasan yuridis penerapan keadilan restoratif di peradilan militer secara sah mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA, serta Keputusan Dirjen Badilmiltun Nomor 177/DJMT/SK.OT.01.1/IX/2024. Sebagaimana tabel berikut ini:

Bulan	Memenuhi Syarat RJ	Diputus Melalui RJ
Januari	-	-
Februari	-	-
Maret	-	-
April	-	-

Mei	-	-
Juni	-	-
Juli	-	-
Agustus	-	-
September	-	-
Oktober	-	-
November	-	-
Desember	-	-
JUMLAH	-	-

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative** pada tahun 2025 dapat terpenuhi sebesar 0%. Sebagaimana terlihat pada Tabel pencapaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	0%	0%	0%

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Pada tahun 2025, realisasi kinerja untuk indikator persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tercatat belum ada, mengingat tidak terdapat perkara yang diselesaikan dengan pendekatan tersebut sepanjang tahun berjalan. Selain itu, dikarenakan indikator ini merupakan rumusan sasaran baru yang mulai diimplementasikan pada periode Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025, maka belum terdapat data historis yang dapat digunakan sebagai pembanding dengan capaian tahun lalu maupun beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan analisis tren maupun perbandingan fluktuasi capaian kinerja secara time-series belum dapat disajikan pada dokumen laporan periode ini. Ke depannya, pemantauan dan pencatatan data penyelesaian perkara ini akan terus dioptimalkan secara konsisten agar dapat menjadi

landasan evaluasi komparatif yang valid pada penyusunan laporan di tahun-tahun mendatang.

Adapun perbandingannya dapat di lihat pada tabel dan grafik berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja (Realisasi)					Kenaikan/ Penurunan
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	-	-	-	-	0%	-

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Realisasi kinerja untuk indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui keadilan restoratif pada tahun 2025 di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tercatat belum dapat menyumbangkan capaian persentase kuantitatif terhadap target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Hal ini dikarenakan indikator tersebut baru diimplementasikan pada tahun berjalan, di mana ketiadaan perkara dengan kualifikasi restoratif membuat capaian awal masih berada pada angka nol. Meskipun demikian, penetapan target dan realisasi di tahun 2025 ini secara fungsional telah menjadi baseline atau titik tolak awal bagi evaluasi dan pengukuran kinerja pada periode-periode selanjutnya di dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Kedepannya, langkah-langkah strategis akan terus dioptimalkan guna memastikan penerapan keadilan restoratif dapat berjalan sesuai koridor hukum, sehingga target kumulatif jangka menengah pada akhir periode Renstra dapat terealisasi secara maksimal.

Perbandingan realisasi pencapaian target kinerja sampai dengan tahun 2025 pada indikator kinerja Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Keterangan
	Realisasi						
	2021	2022	2023	2024	2025		
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	-	-	-	-	0%	0%	-

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional.

Pada tahun 2025, realisasi kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan untuk penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif tercatat sebesar 0%, yang mana capaian ini secara persentase masih berada di bawah target standar nasional yang ditetapkan sebesar 10,48%. Belum tercapainya angka standar nasional tersebut bukanlah indikasi kurang optimalnya kinerja penyelesaian perkara, melainkan secara objektif murni disebabkan oleh ketiadaan perkara yang masuk dengan kualifikasi pemenuhan syarat untuk diselesaikan melalui jalur restoratif. Kondisi faktual berupa ketiadaan perkara restoratif ini secara langsung berimplikasi pada tidak adanya kontribusi capaian kuantitatif yang dapat dikomparasikan secara proporsional dengan persentase target nasional. Meskipun demikian, jajaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan akan terus mengoptimalkan penerapan prinsip restorative justice pada penanganan perkara yang relevan di masa mendatang guna bersinergi secara maksimal dengan standar peradilan nasional.

Dengan demikian target kinerja pada indikator kinerja Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2025 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI terdapat perbedaan dimana Mahkamah Agung RI hanya menetapkan target pada

tahun 2025 sebesar 10,48% sedangkan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan target yakni sebesar 0%, perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada tabel berikut ini:

No	Indikator Kinerja	Target MARI	Target Satker	Realisasi Satker	Capaian Satker	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	10,48%	0%	0%	0%	-

e. Analisis Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Meskipun realisasi kinerja secara kuantitatif berada pada angka 0% akibat ketiadaan perkara yang memenuhi syarat keadilan restoratif, keberhasilan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun 2025 justru terletak pada kesiapan sistem dan aparatur peradilan dalam merespons kebijakan IKU baru tersebut. Sebagai alternatif solusi dan langkah proaktif atas ketiadaan perkara, pengadilan telah mengoptimalkan waktu berjalan untuk melakukan kajian internal serta penguatan pemahaman terkait regulasi keadilan restoratif agar seluruh personel memiliki keseragaman persepsi operasional. Upaya peningkatan kapasitas dan kesiapan administratif ini sangat esensial untuk memastikan bahwa apabila terdapat perkara yang memenuhi kriteria di masa mendatang, proses penyelesaiannya dapat langsung dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. Melalui pemantapan fondasi prosedural ini, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berkomitmen untuk terus menjaga kualitas penegakan hukum sekaligus bersiap secara optimal dalam mendukung program pembaruan tata peradilan.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Capaian pada indikator kinerja **Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative** tidak terlepas dari efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Komposisi ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) bagian teknis di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2025 hanya terdiri dari 7 (tujuh)

orang Hakim Militer termasuk Plt. Kepala, 1 (satu) orang Panitera, dan 3 (tiga) orang Penitera Pengganti, sedangkan jabatan Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Pidana masih kosong.

Namun demikian Sumber Daya Manusia (SDM) Hakim dan Panitera yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dengan pembagian tugas secara proporsional, Kadilmil juga melaksanakan persidangan sesuai komposisi Majelis Hakim yang tersedia di unit kerja. Dengan komposisi tenaga teknis tersebut pada tahun 2025 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat menyelesaikan dan memutus semua perkara yang ditangani sebanyak 63 (enam puluh tiga).

Capaian indikator kinerja Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative tersebut tidak terlepas pula dukungan kinerja para staf baik pada bagian Kepaniteraan maupun pada bagian Kesekretariatan. Semua staf melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan beban kerja yang ada dan dilaksanakan sesuai SOP dan aturan yang ada. Sehingga semua beban kerja dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) tidak menjadi halangan bagi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelesaian perkara dan tugas-tugas administrasi lainnya. Semua beban kerja dapat dibagi habis kepada Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang tersedia.

Selain dukungan kinerja dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di unit kerja, capaian indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu juga di dukung oleh ketersediaan pagu anggaran pada DIPA (05) Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI khusus untuk putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan. Dengan dukungan anggaran tersebut pemenuhan target kinerja pada Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative akan terealisasi sesuai target tahunan yang telah ditetapkan.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun 2025 telah melaksanakan Beberapa program kerja yang secara tidak langsung mendukung capaian pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tahun 2025 antara lain:

- 1) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
- 2) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
- 3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- 4) Rapat bulanan sebagai media pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja oleh Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terhadap seluruh bagian.
- 5) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dilaksanakan per triwulan.
- 6) Mengikuti seluruh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

7. Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu pada tahun 2025 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun berjalan. realisasi ini menunjukkan efektivitas integrasi sistem pertukaran data perkara pidana secara terpadu antara Penyidik (Polisi Militer), Oditurat, dan Pengadilan Militer dalam memangkas prosedur birokrasi manual. Dengan demikian, terpenuhinya target ini merefleksikan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia satuan kerja dalam

mendukung modernisasi peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Sebagaimana tabel berikut ini:

Bulan	Dilimpahkan Melalui E-berpadu		Jumlah
	Pidana	Pelanggaran	
Januari	-	-	-
Februari	-	-	-
Maret	-	-	-
April	-	-	-
Mei	3	-	3
Juni	-	-	-
Juli	-	-	-
Agustus	-	-	-
September	-	-	-
Oktober	-	-	-
November	-	-	-
Desember	-	-	-
JUMLAH	3	-	3

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)** pada tahun 2025 dapat terpenuhi sebesar 100%. Sebagaimana terlihat pada Tabel pencapaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	7.4%	7,4%	100%

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Realisasi kinerja persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) pada tahun 2025 belum dapat diperbandingkan dengan tahun lalu maupun beberapa tahun terakhir karena indikator ini merupakan parameter baru yang ditetapkan dalam IKU tahun 2025. Penerapan indikator ini didasarkan pada amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang

mewajibkan modernisasi proses pelimpahan berkas dari Oditurat ke Pengadilan. Oleh karena itu, capaian tahun ini berfungsi sebagai data dasar (*baseline*) untuk memetakan tingkat adaptasi teknologi dan kepatuhan aparat peradilan militer terhadap sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, analisis saat ini difokuskan pada keberhasilan integrasi sistem antar lembaga penegak hukum sebagai fondasi evaluasi tren kinerja digitalisasi pada periode mendatang.

Adapun perbandingannya dapat di lihat pada tabel dan grafik berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja (Realisasi)					Kenaikan/ Penurunan
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	-	-	-	-	7,4%	-

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Realisasi kinerja pelimpahan perkara pidana militer secara elektronik melalui e-Berpadu pada tahun 2025 merupakan capaian strategis yang berkontribusi langsung terhadap target jangka menengah mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi. Keberhasilan implementasi e-Berpadu di tahun 2025 menunjukkan bahwa satuan kerja telah memiliki kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung percepatan administrasi perkara sesuai peta jalan reformasi birokrasi. Dengan demikian, performa positif di awal periode ini menjadi modal fundamental untuk menjamin tercapainya sasaran strategis penguatan layanan peradilan yang cepat dan transparan hingga akhir masa perencanaan strategis.

Perbandingan realisasi pencapaian target kinerja sampai dengan tahun 2025 pada indikator kinerja Persentase putusan pengadilan yang

diunggah pada direktori putusan dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Keterangan
	Realisasi						
	2021	2022	2023	2024	2025		
Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	-	-	-	-	7,4%	7,4%	-

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional.

Realisasi kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada indikator persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) tahun ini mencapai 7,4%, yang mana angka ini masih berada jauh di bawah standar nasional sebesar 89,80%. Meskipun capaian tersebut telah berhasil memenuhi target internal satuan kerja yang juga ditetapkan pada angka 7,4%, terdapat kesenjangan yang sangat nyata jika disandingkan dengan ekspektasi digitalisasi peradilan tingkat nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses transisi menuju pelimpahan perkara yang sepenuhnya terintegrasi secara digital masih memerlukan penyesuaian teknis serta koordinasi yang lebih intensif dengan aparat penegak hukum lainnya di wilayah yurisdiksi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan percepatan adaptasi teknologi agar pada periode mendatang tingkat pemanfaatan aplikasi e-Berpadu dapat didorong secara bertahap untuk mendekati standar nasional yang berlaku. perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada tabel berikut ini:

No	Indikator Kinerja	Target MARI	Target Satker	Realisasi Satker	Capaian Satker	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	89,80%	7,4%	7,4%	100%	Target Satker tercapai

e. Analisis Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Keberhasilan pencapaian target pelimpahan perkara secara elektronik pada tahun 2025 didorong oleh efektivitas koordinasi intensif antar aparat penegak hukum serta kesiapan infrastruktur teknologi informasi di satuan kerja. Implementasi ini dilaksanakan dengan memedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 yang menjadi panduan teknis administrasi perkara pidana secara elektronik. Guna mengantisipasi kendala teknis, alternatif solusi yang telah dijalankan meliputi pelaksanaan sosialisasi berkala kepada Oditurat Militer dan penyediaan layanan pendampingan (*helpdesk*) khusus untuk mempercepat proses adaptasi penggunaan aplikasi. Langkah-langkah preventif tersebut terbukti signifikan dalam meningkatkan akurasi data pelimpahan sekaligus menjamin kelancaran transformasi sistem administrasi perkara dari manual ke digital.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Capaian pada indikator kinerja **Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)** tidak terlepas dari efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Komposisi ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) bagian teknis di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2025 hanya terdiri dari 7 (tujuh) orang Hakim Militer termasuk Plt. Kepala, 1 (satu) orang Panitera, dan 3 (tiga) orang Panitera Pengganti, sedangkan jabatan Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Pidana masih kosong.

Namun demikian Sumber Daya Manusia (SDM) Hakim dan Panitera yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dengan pembagian

tugas secara proporsional, Kadilmil juga melaksanakan persidangan sesuai komposisi Majelis Hakim yang tersedia di unit kerja. Dengan komposisi tenaga teknis tersebut pada tahun 2025 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat menyelesaikan dan memutus semua perkara yang ditangani sebanyak 63 (enam puluh tiga).

Capaian indikator kinerja Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative tersebut tidak terlepas pula dukungan kinerja para staf baik pada bagian Kepaniteraan maupun pada bagian Kesekretariatan. Semua staf melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan beban kerja yang ada dan dilaksanakan sesuai SOP dan aturan yang ada. Sehingga semua beban kerja dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) tidak menjadi halangan bagi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelesaian perkara dan tugas-tugas administrasi lainnya. Semua beban kerja dapat dibagi habis kepada Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang tersedia.

Selain dukungan kinerja dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di unit kerja, capaian indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu juga di dukung oleh ketersediaan pagu anggaran pada DIPA (05) Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI khusus untuk putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan. Dengan dukungan anggaran tersebut pemenuhan target kinerja pada Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative akan terealisasi sesuai target tahunan yang telah ditetapkan.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun 2025 telah melaksanakan Beberapa program kerja yang secara tidak langsung mendukung capaian pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tahun 2025 antara lain:

- 1) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
- 2) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
- 3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- 4) Rapat bulanan sebagai media pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja oleh Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terhadap seluruh bagian.
- 5) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dilaksanakan per triwulan.
- 6) Mengikuti seluruh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

8. Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator persentase layanan perkara pidana militer melalui e-Berpadu tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang optimal dan berhasil memenuhi target yang ditetapkan. Keberhasilan realisasi ini didorong oleh tingginya tingkat partisipasi dan kepatuhan aparat penegak hukum dalam memanfaatkan integrasi sistem administrasi perkara secara elektronik. Implementasi e-Berpadu terbukti efektif memangkas birokrasi manual, sehingga mempercepat proses pelimpahan berkas dan meningkatkan transparansi layanan peradilan. Dengan demikian, capaian ini merefleksikan komitmen kuat organisasi dalam mewujudkan modernisasi peradilan militer yang adaptif terhadap kemajuan teknologi informasi. Sebagaimana tabel berikut ini:

Bulan	Layanan Yang Diajukan Melalui E-berpadu		Jumlah
	Pidana	Pelanggaran	
Januari	-	-	-
Februari	-	-	-
Maret	-	-	-
April	-	-	-
Mei	3	-	3
Juni	-	-	-
Juli	-	-	-
Agustus	-	-	-
September	-	-	-
Oktober	-	-	-
November	-	-	-
Desember	-	-	-
JUMLAH	3	-	3

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Indikator persentase layanan perkara pidana militer melalui aplikasi e-Berpadu merupakan parameter baru yang ditetapkan pada IKU Tahun 2025, sehingga perbandingan tren capaian dengan tahun-tahun sebelumnya belum dapat disajikan secara historis. Implementasi ini didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Persidangan dan Administrasi Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang memperluas digitalisasi administrasi perkara bagi seluruh lingkungan peradilan, termasuk Peradilan Militer. Ketiadaan data pembanding ini disebabkan oleh masa transisi dari sistem manual ke digital yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan semangat reformasi birokrasi. Oleh karena itu, capaian tahun 2025 akan ditetapkan sebagai baseline data (nilai dasar) yang akan menjadi standar evaluasi dan pembanding utama bagi peningkatan kinerja organisasi di masa yang akan datang. Adapun perbandingannya dapat di lihat pada tabel dan grafik berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja (Realisasi)					Kenaikan/ Penurunan
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	-	-	-	-	100%	-

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Realisasi capaian indikator persentase layanan perkara pidana militer secara elektronik pada tahun 2025 merupakan langkah awal yang krusial dalam memenuhi target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Capaian tahun ini menjadi fondasi digitalisasi birokrasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Meskipun merupakan indikator baru, akselerasi penggunaan aplikasi e-Berpadu menunjukkan komitmen organisasi dalam mewujudkan target akhir Renstra yang berfokus pada peradilan modern berbasis teknologi informasi. Penyelarasan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah ini dipastikan tetap berada pada jalur yang tepat guna mendukung terciptanya efisiensi penanganan perkara di lingkungan peradilan militer.

Perbandingan realisasi pencapaian target kinerja sampai dengan tahun 2025 pada indikator kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Keterangan
	Realisasi						
	2021	2022	2023	2024	2025		
Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	-	-	-	-	100%	100%	-

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional.

Capaian realisasi indikator persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun ini tercatat sebesar 7,4%, yang menunjukkan selisih signifikan dibandingkan dengan Standar Nasional sebesar 89,93%. Meskipun angka tersebut berada jauh di bawah rata-rata nasional, realisasi 7,4% ini telah berhasil memenuhi target internal satuan kerja secara maksimal yang memang ditetapkan pada angka tersebut dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur serta tahapan transisi sistem di tingkat lokal. Kesenjangan antara capaian lokal dengan standar nasional ini mengindikasikan bahwa implementasi transformasi layanan e-Berpadu di wilayah yurisdiksi masih berada dalam tahap adaptasi awal dan belum seoptimal pemanfaatan di tingkat pusat. Ke depannya, diperlukan upaya akselerasi yang strategis melalui peningkatan sarana prasarana dan penguatan koordinasi antar penegak hukum agar capaian pada periode mendatang dapat secara bertahap meningkat menyamai standar nasional.

No	Indikator Kinerja	Target MARI	Target Satker	Realisasi Satker	Capaian Satker	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	89,93%	7,4%	7,4%	100%	Target Satker tercapai

e. Analisis Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Keberhasilan pencapaian target kinerja ini didorong oleh optimalisasi koordinasi antaraparat penegak hukum serta komitmen pimpinan dalam mengimplementasikan transformasi digital di lingkungan peradilan militer. Sebagai alternatif solusi untuk mempercepat adaptasi terhadap sistem baru, satuan kerja telah melaksanakan sosialisasi intensif dan pendampingan teknis (transfer knowledge) kepada pengguna layanan, khususnya Oditurat Militer dan penyidik. Langkah-langkah strategis tersebut dilaksanakan secara konsisten dengan berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022, yang menekankan pentingnya sinergitas antarlembaga dalam administrasi perkara terpadu. Upaya proaktif ini terbukti efektif memitigasi kendala teknis di lapangan serta meningkatkan akurasi data perkara, sehingga pelayanan peradilan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Capaian pada indikator kinerja **Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)** tidak terlepas dari efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Komposisi ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) bagian teknis di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2025 hanya terdiri dari 7 (tujuh) orang Hakim Militer termasuk Plt. Kepala, 1 (satu) orang Panitera, dan 3 (tiga) orang Panitera Pengganti, sedangkan jabatan Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Pidana masih kosong.

Namun demikian Sumber Daya Manusia (SDM) Hakim dan Panitera yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dengan pembagian tugas secara proporsional, Kadilmil juga melaksanakan persidangan sesuai komposisi Majelis Hakim yang tersedia di unit kerja. Dengan komposisi tenaga teknis tersebut pada tahun 2025 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat menyelesaikan dan memutus semua perkara yang ditangani sebanyak 63 (enam puluh tiga).

Capaian indikator kinerja Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative tersebut tidak terlepas pula dukungan kinerja para staf baik pada bagian Kepaniteraan maupun pada bagian Kesekretariatan. Semua staf melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan beban kerja yang ada dan dilaksanakan sesuai SOP dan aturan yang ada. Sehingga semua beban kerja dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) tidak menjadi halangan bagi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelesaian perkara dan tugas-tugas administrasi lainnya. Semua beban kerja dapat dibagi habis kepada Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang tersedia.

Selain dukungan kinerja dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di unit kerja, capaian indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu juga di dukung oleh ketersediaan pagu anggaran pada DIPA (05) Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI khusus untuk putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan. Dengan dukungan anggaran tersebut pemenuhan target kinerja pada Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative akan terealisasi sesuai target tahunan yang telah ditetapkan.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun 2025 telah melaksanakan Beberapa program kerja yang secara tidak langsung mendukung capaian pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tahun 2025 antara lain:

- 1) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

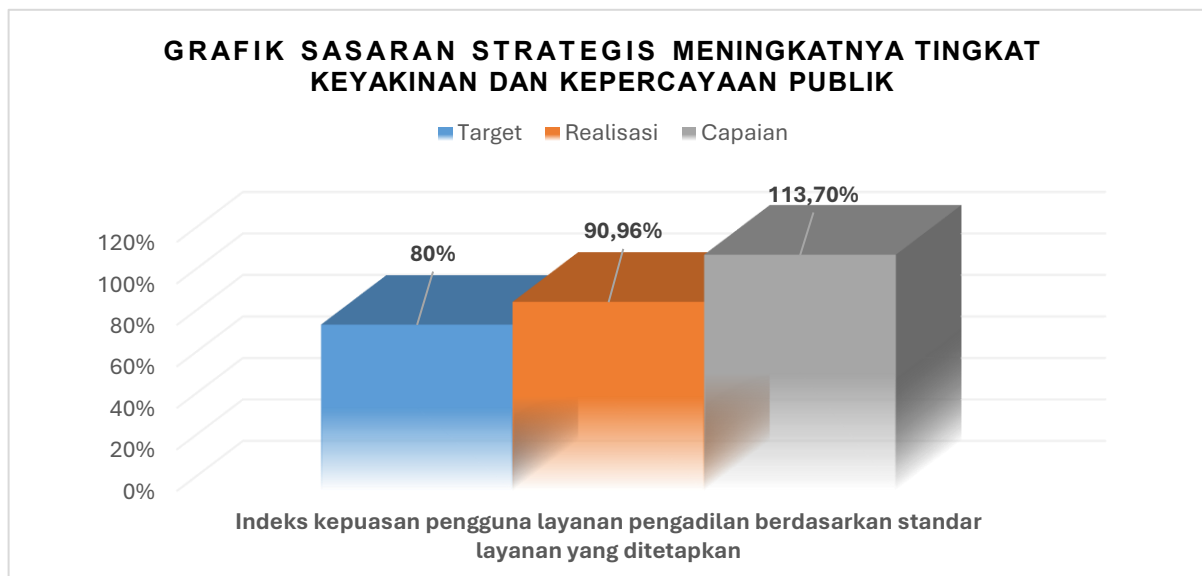
- 2) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
- 3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- 4) Rapat bulanan sebagai media pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja oleh Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terhadap seluruh bagian.
- 5) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dilaksanakan per triwulan.
- 6) Mengikuti seluruh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Sasaran 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan diukur dengan menetapkan 1 (satu) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran teknis yudisial ini, pada tahun 2025 dapat digambarkan pada tabel dan grafik sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	80%	90,96%	113,70%



Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Survei dapat dilakukan secara tetap dengan jangka waktu (periode) tertentu. Survei dapat dilakukan setiap 3 bulan (triwulan). Namun demikian Pengadilan Militer I-07 Balikpapan melaksanakan survei setiap 3 bulan (triwulan) sesuai Surat Edaran Dirjen Badilmiltun MARI Nomor 360/Djmt/SE/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Metode yang digunakan untuk melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran skala Likert. Pada skala likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap sesuatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Responden survei adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan.

Adapun unsur Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur yaitu:

- a. Persyaratan Pelayanan.
- b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur.
- c. Waktu Pelayanan.
- d. Biaya/Tarif*).
- e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.
- f. Kompetensi Pelaksana.
- g. Perilaku Pelaksana.
- h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.
- i. Sarana dan .

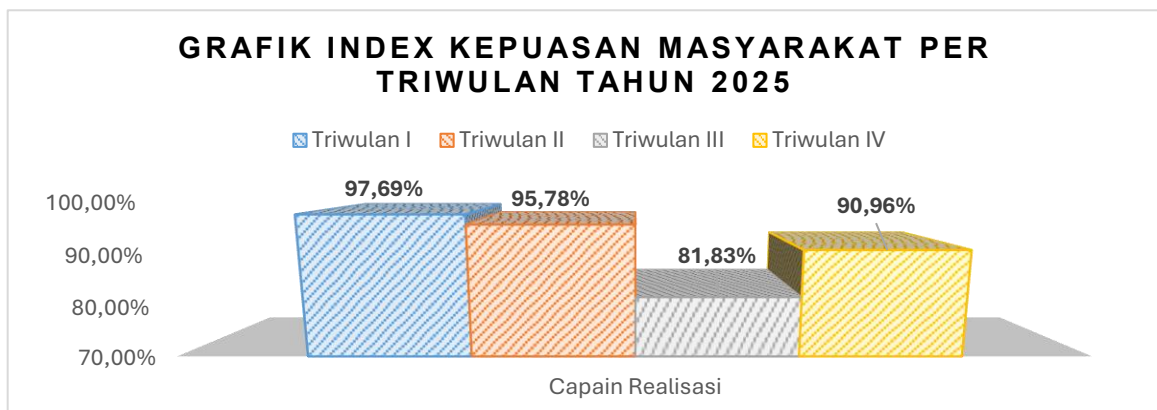
Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017.

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	2	3	4	5
1.	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2.	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Babik
3.	3,0644- 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4.	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.

Tingkat capaian indikator kinerja index persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan pada periode triwulan I, II, III dan triwulan IV tahun 2025 telah memenuhi target, rasio index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada triwulan IV tahun 2025 sebesar 90,96% (sembilan puluh koma sembilan puluh enam persen) dengan mutu pelayanan “A” memuaskan. Realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel realisasi per triwulan capaian target index persepsi responden/stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2025 sebagai berikut:

Indikator Kerja	Target	Realisasi				Capaian
		TW.I 2025	TW.II 2025	TW.III 2025	TW.IV 2025	
1	2	3	4	5	6	7
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	80%	97,69%	95,78%	81,83%	90,96%	91,56%



Pada tabel dan grafik index kepuasan masyarakat tahun 2025 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa survei kepuasan masyarakat (SKM) dilaksanakan setiap triwulan, hasil index kepuasan masyarakat (IKM) pada setiap triwulan tersebut telah memenuhi target tahun 2025.

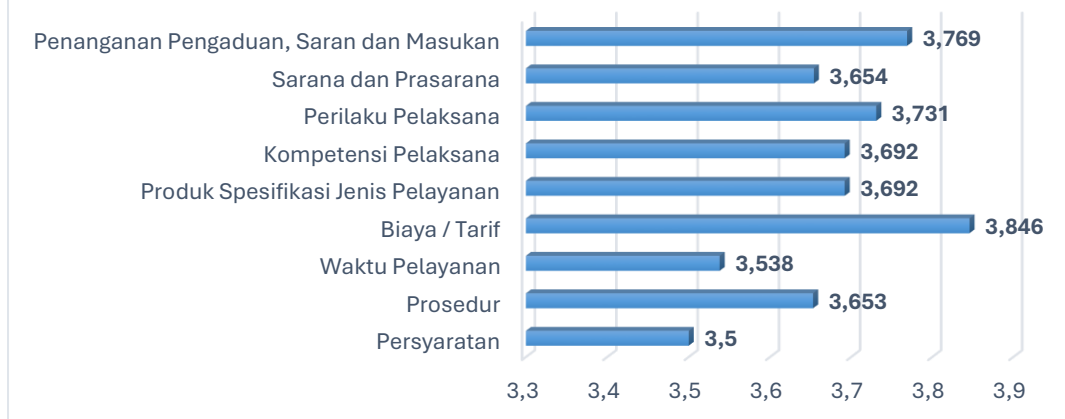
Pengukuran capaian target kinerja pada indikator index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2025 akan diukur dengan membandingkan target dengan capaian hasil index kepuasan masyarakat (IKM) pada triwulan IV tahun 2025.

Dalam memaksimalkan kinerja sektor pelayanan public terdapat beberapa hal penting yang harus diutamakan, pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya mendapatkan informasi pelayanan oleh anggota TNI atau masyarakat, kecepatan pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Kedua adalah indikator sufisiensi yang dapat di lihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan.

Berikut tabel nilai rata-rata skor dan peringkat pada setiap ruang lingkup pengukuran index kepuasan pengguna atau masyarakat layanan Pengadilan triwulan IV tahun 2025.

No	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori
1	2	3	4
1.	Persyaratan	3,5	Sangat Baik
2.	Prosedur	3,653	Sangat Baik
3.	Waktu Pelayanan	3,538	Sangat Baik
4.	Biaya / Tarif	3,846	Sangat Baik
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,692	Sangat Baik
6.	Kompetensi Pelaksana	3,692	Sangat Baik
7.	Perilaku Pelaksana	3,731	Sangat Baik
8.	Sarana dan Prasarana	3,654	Sangat Baik
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,769	Sangat Baik
Nilai Rata-Rata Tertimbang		3,675	Sangat Baik
IKM Unit Pelayanan setelah di Konversi		90,96 Mutu Pelayanan "A" (Memuaskan)	

GRAFIK NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN PADA UNIT PELAYANAN PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN



Berdasarkan data dan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 9 (sembilan) unsur pelayanan semuanya memiliki kualitas penilaian yang sangat baik, namun demikian tetap memerlukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan untuk mempertahankan dan mendapatkan nilai yang terbaik pada periode berikutnya.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.

Pengukuran capaian target kinerja pada indikator index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir akan diukur dengan membandingkan capaian hasil index kepuasan masyarakat (IKM) unit pelayanan periode triwulan IV tahun 2025 dengan capaian hasil index kepuasan masyarakat (IKM) unit pelayanan pada triwulan IV tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir.

Jika dibandingkan pencapaian index kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2025 dengan pencapaian target indikator Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2025 mengalami penurunan index kepuasan masyarakat (IKM) unit pelayanan.

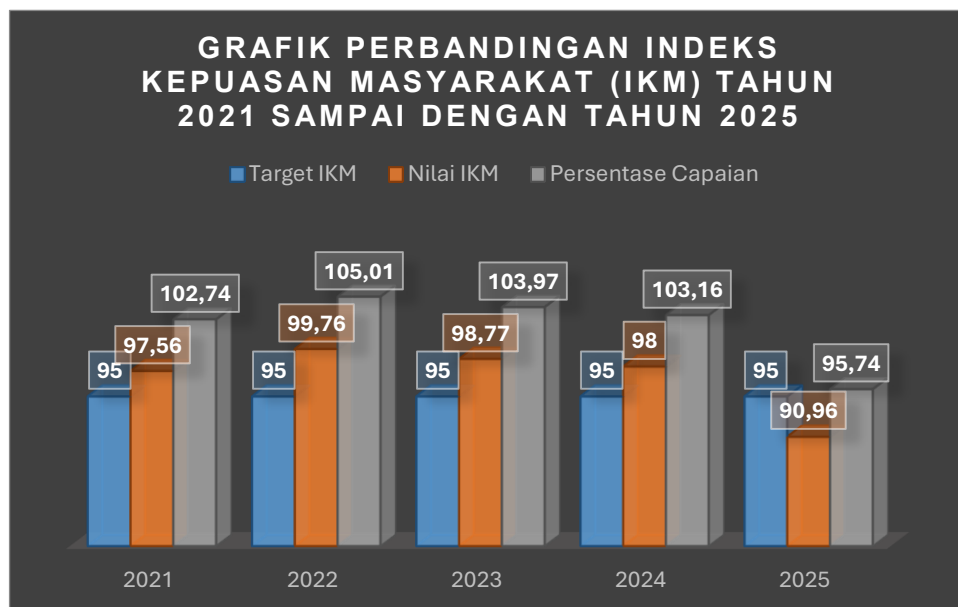
Pada tahun 2025 capaian index kepuasan masyarakat (IKM) unit pelayanan sebesar 90,96 dengan mutu pelayanan "A" sedangkan pencapaian index kepuasan masyarakat (IKM) unit pelayanan pada tahun 2024 sebesar 98 dengan mutu pelayanan "A". Berikut perbandingan pencapaian indikator Index persepsi stakeholder yang puas terhadap

layanan peradilan tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 pada tabel dan grafik berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja (Realisasi)					Kenaikan/ Penurunan
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	97,56%	99,76%	98,77%	98%	90,96%	Penurunan 7.4% dari tahun 2024, 7,81% dari tahun 2023, 8,8% dari tahun 2022 dan 6,6% dari tahun 2021

Tabel Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2024

Tahun	Target IKM	Nilai IKM	Persentase Capaian
1	2	3	4
2021	95	97,56	102,74
2022	95	99,76	105,01
2023	95	98,77	103,97
2024	95	98	103,16
2025	95	90,96	95,74



Berdasarkan pada tabel dan grafik diatas bahwa realisasi pencapaian target kinerja pada indikator index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan dapat disimpulkan bahwa pada tahun

2025 mengalami penurunan dari hasil penilaian mutu pelayanan dan nilai index kepuasan masyarakat (IKM) dibandingkan tahun 2024 dan beberapa tahun sebelumnya dengan nilai IKM tahun 2025 sebesar 90,96 dengan mutu pelayanan “A” (memuaskan).

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perbandingan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Keterangan
	Realisasi						
	2021	2022	2023	2024	2025		
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	97,56%	99,76%	98,77 %	98%	90,96%	80%	Realisasi 5 tahun = (97,56+99,76+98,77 +98+90,96) /5 = 97,01%

Realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja indikator index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2025 belum memenuhi target tahunan dan target jangka menengah yang telah ditetapkan. Pada tabel di atas terlihat pula bahwa capaian index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan pada tahun 2025 dan beberapa tahun sebelumnya belum

memenuhi target index kepuasan masyarakat (IKM) jangka menengah dengan nilai index kepuasan masyarakat (IKM) yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis sebesar 95 (sembilan puluh lima) mutu pelayanan “A”. Dengan capaian index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 akan diupayakan capaian index mutu layanan jangka menengah akan tetap dapat terpenuhi dan tercapai pada tahun berikutnya.

Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kinerja Aparatur Pengadilan dan meningkatkan mutu pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan dengan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan serta meningkatkan kompetensi Hakim, Panitera Pengganti serta aparatur Pengadilan lainnya untuk mengikuti diklat dan pelatihan-pelatihan sehingga dapat menghasilkan produk Pengadilan yang berkualitas dan berkeadilan.

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/Sek/SK.RA1.3/x/2025 tanggal 25 November 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ditetapkan bahwa nilai persepsi minimal 3,78 dengan nilai konversi internal IKM index harus lebih dari 80.

Berdasarkan Keputusan Sekma tersebut target kinerja pada indikator kinerja index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2025 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI terdapat perbedaan dimana Mahkamah Agung RI hanya menetapkan target pada tahun 2025 dengan nilai IKM sebesar 80 sedangkan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan target lebih tinggi dengan nilai IKM sebesar 95, perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada table sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target IKM MARI	Target IKM Satker	Realisasi IKM Satker	Capaian IKM Satker	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	80%	80%	90,96%	113,70%	Target Nasional (MARI) tercapai

Dengan demikian realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja indikator index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2025 secara Nasional telah memenuhi target yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Terkait Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

Secara umum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun 2025 telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melayani pencari keadilan. Para Hakim dan Panitera sebagai tenaga teknis Pengadilan sudah berupaya secara maksimal untuk menghasilkan produk putusan berkualitas dan berkeadilan sesuai penerapan dalam KUHP dan KUHPM serta penerapan Hukum Acara Pidana didalam persidangan sehingga terwujudnya pelayanan yang prima dan berkeadilan.

Penyediaan sarana dan prasana dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjadi skala prioritas bagi Pengadilan dalam meningkatkan pelayanan, selain itu Pengadilan harus memberikan kemudahan-kemudahan baik terkait akses pelayanan maupun akses informasi pengadilan, oleh karena itu Pengadilan Militer I-07 Balikpapan membuat beberapa inovasi terkait pelayanan. Kepuasan masyarakat atau anggota TNI yang berperkara di Pengadilan dalam memperoleh informasi dan pelayanan menjadi suatu keniscayaan yang harus diwujudkan.

Dengan demikian pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik oleh penyelenggara pelayanan publik yakni Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terhadap pelayanan publik yang

diberikan kepada masyarakat akan dipergunakan oleh unit kerja untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan layanan Pengadilan.

Beberapa faktor penyebab keberhasilan atau peningkatan index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang memperoleh penilaian sangat baik antara lain:

- 1) Kinerja aparatur Pengadilan dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya serta berpedoman pada SOP dan peraturan yang ada.
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di bidangnya.
- 3) Managemant waktu yang efisien.
- 4) Mengintegrasikan pelayanan dari manual ke elektronik.
- 5) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
- 6) Terbangunnya kesadaran, pola pikir (*mainset*) dan budaya kerja dari Kadilmil, Pokkimmil dan seluruh aparatur Pengadilan.
- 7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara berkala.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Capaian pada indikator kinerja index persepsi stakeholder yang merasa puas terhadap layanan peradilan tidak terlepas dari efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Komposisi ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2025 terdiri dari 26 (dua puluh enam) orang dengan rincian sebagai berikut :

- 1) 7 (tujuh) orang Hakim termasuk Kepala.
- 2) 1 (satu) orang Panitera.
- 3) Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum masih kosong.
- 4) 3 (tiga) orang Panitera Pengganti.
- 5) 1 (satu) orang Sekretaris.
- 6) 2 (tiga) orang Kasubbag, 1 (satu) orang Plt. Kasubbag Umum dan Keuangan.

- 7) 7 (Tujuh) orang staff (CPNS, PNS dan Bintara).
- 8) 6 (Enam) orang PPPK.
- 9) 2 (Dua) orang PPNPN.

Namun demikian Sumber Daya Manusia (SDM) Hakim dan Panitera yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dengan pembagian penanganan berkas perkara kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dilakukan secara proporsional, Plt. Kadilmil juga melaksanakan persidangan sesuai komposisi Majelis Hakim yang tersedia di unit kerja. Terbukti dengan komposisi tenaga teknis yang ada tersebut Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat menyelesaikan dan memutus semua perkara yang ditangani tahun 2025 sebanyak 63 (enam puluh tiga) perkara.

Begitu pula dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada bagian non teknis atau bagian Kesekretariatan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia belum memenuhi kriteria standar jumlah pegawai pada Pengadilan Tipe A. Masih terdapat jabatan-jabatan kosong seperti jabatan Panmud Hukum, Panmud Pidana dan beberapa jabatan fungsional, analis dan jabatan pengelola yang belum terisi, sehingga tugas dan tanggung jawab jabatan yang kosong tersebut dikerjakan oleh pegawai yang menduduki jabatan lain.

Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) ini tidak menjadi halangan bagi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelesaian perkara dan tugas-tugas administrasi lainnya. Semua beban kerja dapat dibagi habis kepada Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang tersedia.

Salah satu contoh pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada yaitu seperti belum tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai khusus front office yang bertugas di area Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Untuk mengisi petugas pada area PTSP tersebut Kadilmil menerapkan kebijakan dengan membuat jadwal piket hari Senin sampai dengan Jum'at bagi Staf dan PPNPN secara bergiliran. Para Staf dan PPNPN yang bertugas di PTSP tersebut dilaksanakan pelatihan oleh pengawas dan penanggung jawab PTSP.

Dengan pelatihan dan sosialisasi pelayanan PTSP tersebut para Staf dan PPNPN memiliki keterampilan dalam memberikan pelayanan

dan menguasai produk-produk layanan Pengadilan, dengan terselenggaranya pelayanan yang baik tersebut diharapkan index responden yang puas terhadap layanan Pengadilan semakin meningkat dan dapat mempertahankan nilai index yang “sangat baik” tersebut.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Beberapa program kerja yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain:

- 1) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil survey Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Anti Korupsi setiap Triwulan.
- 2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
- 3) Penandatanganan Perjanjian Kerja Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kepala Pengadilan Militer dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
- 4) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- 5) Rapat bulanan sebagai media pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja oleh Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terhadap seluruh bagian.
- 6) Pengawasan setiap Triwulan oleh Hakim Pengawas Bidang yang telah ditunjuk berdasarkan Kep Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
- 7) Mengikuti seluruh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

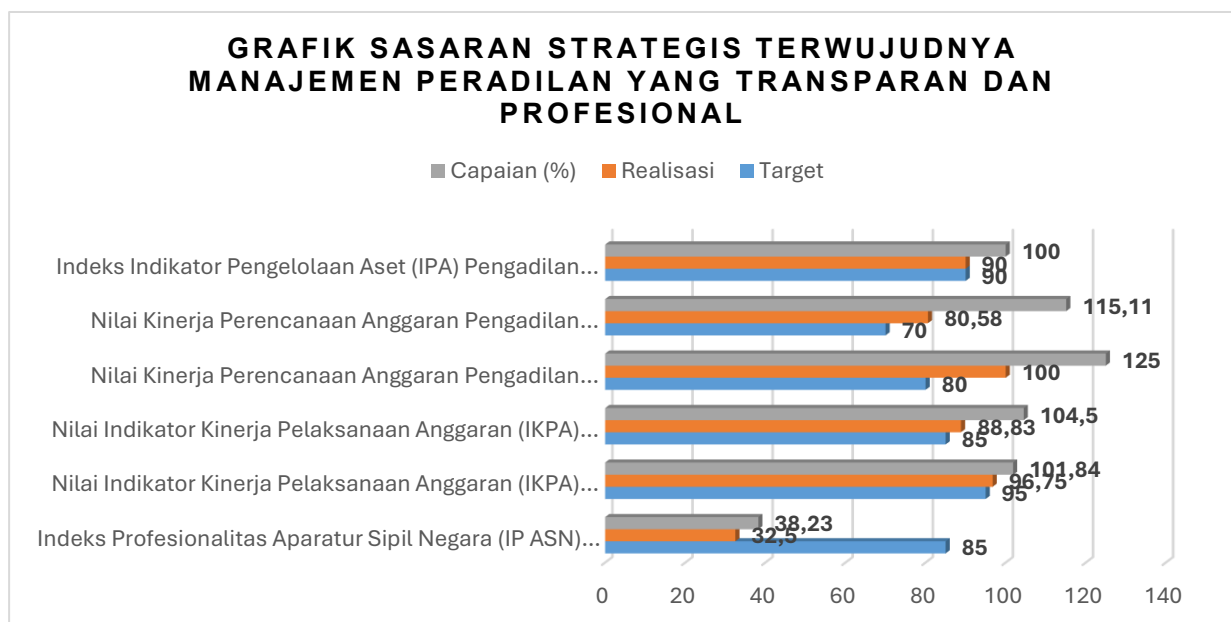
Sasaran 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan diukur dengan menetapkan 6 (enam) indikator

kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran teknis yudisial ini, pada tahun 2025 dapat digambarkan pada tabel dan grafik sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	85	32.5	38,23%
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	95	96,75	101,84%
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun	85	87.36	102,76%
4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	80	100	125%
5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun	70	80,58	115.11%
6	Indeks Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	90	90	100%



Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Pada tahun 2025, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah menetapkan target spesifik untuk indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) sebagai wujud komitmen dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun demikian, perbandingan kuantitatif antara besaran target yang ditetapkan dengan tingkat realisasi kinerja pada indikator ini belum dapat disajikan secara komprehensif di dalam laporan. Kondisi tersebut terjadi karena adanya kendala teknis terkait data dukung pengukuran IP ASN tahun 2025 dan *Human Error* pada masa penyusunan evaluasi ini. Sebagai langkah tindak lanjut, upaya inventarisasi dan koordinasi mengenai kelengkapan data administratif kepegawaian akan terus didorong agar mengurangi *Human Error* pada periode pelaporan selanjutnya.

Empat Dimensi Pengukuran:

- 1) Kualifikasi (40%): Tingkat pendidikan formal.
- 2) Kompetensi (30%): Riwayat pengembangan kompetensi, diklat teknis, dan fungsional.
- 3) Kinerja (25%): Hasil penilaian kinerja individu/organisasi.
- 4) Disiplin (5%): Kepatuhan dan riwayat hukuman disiplin.

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara. Dapat diperoleh data IP ASN Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Sebagai Berikut:

Unit Kerja	Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan
Jumlah Pegawai	28
Jumlah Pegawai Masa Kerja > 1 TH	-
Kategori	-
Kualifikasi (40%)	-
Kompetensi (30%)	-
Kinerja (25%)	-

Disiplin (5%)	-
Indeks Profesional ASN	32,5

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian nilai Indeks Profesional ASN pada indikator kinerja **Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)** pada tahun 2025 adalah 32,5. Akan tetapi nilai IP ASN Personel belum memenuhi target yang direncanakan. Sebagaimana terlihat pada Tabel pencapaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	85	32,5	38,23%

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.

Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan baru mulai ditetapkan dan dilaksanakan pada periode Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025. Oleh karena itu, analisis perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu maupun beberapa tahun terakhir belum dapat dilakukan karena tidak tersedianya data historis. Nilai capaian IP ASN yang diperoleh pada tahun ini akan menjadi data dasar (*baseline*) dalam memetakan tingkat kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai saat ini. Ke depannya, data baseline ini akan menjadi tolok ukur utama untuk mengevaluasi efektivitas program pengembangan sumber daya manusia dan memantau tren peningkatan profesionalitas aparatur pada tahun-tahun berikutnya.

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja (Realisasi)					Kenaikan/ Penurunan
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	-	-	-	-	32,5	-

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Mengingat Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) merupakan indikator yang baru diimplementasikan pada tahun 2025, realisasi kinerja pada tahun ini bertindak sebagai capaian tahun pertama sekaligus pondasi awal (baseline) bagi Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Oleh karena itu, evaluasi saat ini difokuskan secara eksklusif pada perbandingan antara realisasi aktual tahun 2025 dengan target awal tahun berjalan yang telah diproyeksikan dalam dokumen perencanaan strategis jangka menengah tersebut. Pencapaian target IP ASN di tahun pertama ini menjadi indikator krusial yang menunjukkan komitmen awal organisasi, sekaligus memastikan bahwa instansi berada pada jalur yang tepat (*on the right track*) menuju sasaran strategisnya. Ke depannya, capaian awal ini akan digunakan sebagai dasar pijakan dalam mengevaluasi tren serta menyesuaikan strategi pengembangan SDM agar target akhir IP ASN pada penghujung periode Rencana Strategis dapat terpenuhi secara optimal.

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Keterangan
	Realisasi						
	2021	2022	2023	2024	2025		
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	-	-	-	-	32,5	85	-

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional.

Realisasi capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun ini tercatat masih

berada di bawah target instansi maupun standar yang telah ditetapkan secara nasional. Kesenjangan pencapaian ini menunjukkan bahwa pemenuhan terhadap empat dimensi utama penilaian, yakni kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin, masih memerlukan akselerasi agar dapat sejajar dengan rata-rata nasional. Perbandingan ini mengindikasikan adanya tantangan internal dalam pengelolaan sumber daya manusia yang menghambat satuan kerja untuk mencapai ambang batas keprofesionalan ideal yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Sebagai tindak lanjut, hasil evaluasi komparatif ini akan dijadikan landasan strategis untuk memacu program pengembangan kapasitas pegawai agar ke depannya mampu memenuhi standar reformasi birokrasi nasional.

Perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada table sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target IP ASN MARI	Target IP ASN Satker	Realisasi IP ASN Satker	Capaian IP ASN Satker	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	71	85	32,5	38,23%	Target Nasional (MARI) tidak tercapai

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Terkait Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)

Meskipun capaian akhir belum memenuhi target yang ditetapkan, terdapat peningkatan skor secara bertahap pada Indeks Profesionalitas ASN yang didorong oleh tumbuhnya kesadaran pegawai dalam memutakhirkan data rekam jejak kepegawaian secara mandiri melalui sistem informasi kepegawaian (seperti MyASN). Peningkatan parsial ini juga merupakan hasil positif dari partisipasi aktif beberapa aparatur dalam program pengembangan kompetensi, termasuk pelaksanaan pelatihan dasar serta bimbingan teknis yang relevan dengan kebutuhan administrasi peradilan. Selain itu, konsistensi dalam penyusunan dan

evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) beserta penegakan absensi terintegrasi turut memberikan kontribusi nilai pada dimensi kinerja dan kedisiplinan aparatur. Berbagai faktor pengungkit ini menunjukkan adanya progres perbaikan manajemen sumber daya manusia yang akan menjadi modal penting untuk mengejar ketertinggalan target di masa mendatang.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan secara umum telah diupayakan secara maksimal meskipun target akhir Indeks Profesionalitas ASN secara keseluruhan belum sepenuhnya tercapai. Hal ini ditunjukkan melalui optimalisasi beban kerja pegawai yang ada, di mana aparatur didorong untuk mampu beradaptasi dan berkolaborasi dalam menjalankan tugas-tugas administratif maupun pelayanan guna menyeimbangkan kesenjangan kualifikasi yang masih ada. Pemanfaatan SDM yang efisien ini terbukti berhasil menjaga ritme operasional instansi dan ketertiban tata kelola peradilan, kendati ruang lingkup untuk pengembangan kompetensi tingkat lanjut secara masif masih terkendala prioritas waktu kerja. Ke depannya, pemetaan kompetensi dan evaluasi beban kerja akan terus disempurnakan agar produktivitas dan potensi setiap pegawai dapat dikelola lebih efektif, yang pada gilirannya akan mempercepat pemenuhan target keprofesionalan instansi secara nasional.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Beberapa program kerja yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain:

- 1) Penandatanganan Perjanjian Kerja Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

- 2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kepala Pengadilan Militer dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
- 3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- 4) Mengikuti seluruh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.

Pada tahun 2025, realisasi nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berhasil mencapai angka sebesar 96,75 dibandingkan dengan target awal yang telah ditetapkan sebesar 95 Perbandingan capaian beserta evaluasi kinerja anggaran ini diukur secara akuntabel dengan menjadikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Hasil perbandingan persentase tersebut secara langsung merepresentasikan tingkat kualitas perencanaan, efektivitas pelaksanaan, kelancaran pencairan, dan kepatuhan satuan kerja terhadap regulasi tata kelola keuangan negara sepanjang tahun berjalan. Pencapaian evaluasi ini sekaligus menegaskan komitmen nyata instansi dalam merealisasikan pagu anggaran secara tertib dan proporsional guna mendukung kelancaran tugas pokok administrasi peradilan militer.

Rekapitulasi pencapaian nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Komponen	Nilai IKPA DIPA (01)
Revisi DIPA	10
Penyerapan Anggaran	19.92
Penyelesaian Tagihan	0
Dispensasi SPM	0

Deviasi Halaman III DIPA	12.48
Belanja Kontraktual	0
Pengelolaan UP dan TUP	10
Capaian Output	25
Nilai Akhir	96.75
Target	95
Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01)	101.84%

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Balikpapan DIPA (01) pada indikator kinerja **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi** pada tahun 2025 adalah target sebesar 95, realisasi 96,75 dan capaian yang diperoleh yaitu 101,48%. Sebagaimana terlihat pada Tabel pencapaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	95	96,75	101,84%

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Capaian kinerja pelaksanaan anggaran DIPA (01) pada tahun 2025 berhasil menorehkan peningkatan yang memuaskan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Evaluasi terhadap tren lima tahun terakhir memperlihatkan kemampuan organisasi dalam melakukan pemulihan kinerja yang adaptif setelah sempat melewati fase penurunan yang signifikan. Momentum perbaikan di tahun ini bahkan mengantarkan tingkat realisasi nyaris menyamai rekor capaian paling optimal yang

pernah diraih pada permulaan periode lima tahunan tersebut. Dinamika positif ini merepresentasikan tingkat kematangan sistem pengendalian internal serta keandalan tata kelola keuangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang semakin kokoh.

Berikut perbandingan Capaian kinerja pelaksanaan anggaran DIPA (01) tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 pada tabel dan grafik berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja (Realisasi)					Kenaikan/ Penurunan
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	96.85	92.66	95.49	94.95	96,75	Kenaikan 1,8 dari tahun 2024, naik 1,26 dari tahun 2023, naik 4,09 dari tahun 2022 dan turun 0,1 dari tahun 2021

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Pada tahun 2025, realisasi kinerja pelaksanaan anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah berhasil secara meyakinkan melampaui target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis. Apabila dievaluasi secara menyeluruh, sebagian besar capaian tahunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir juga secara konsisten mampu berada di atas standar ekspektasi tersebut meskipun sempat mengalami dinamika. Keberhasilan dalam menjaga tren kinerja di atas ambang batas target strategis ini membuktikan bahwa mekanisme pengelolaan keuangan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi berjalan dengan sangat efektif dan terarah. Konsistensi pencapaian yang positif

hingga akhir periode ini pada akhirnya memberikan fondasi yang solid bagi perumusan sasaran kinerja organisasi pada siklus perencanaan jangka menengah berikutnya.

Perbandingan realisasi Capaian kinerja pelaksanaan anggaran DIPA (01) sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Keterangan
	Realisasi						
	2021	2022	2023	2024	2025		
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	96.85	92.66	95.49	94.95	96,75	95	Realisasi 5 tahun = (96,85+92,66+95,49+94,95+96,75) / 5 = 95,34

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional.

Analisis perbandingan realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada DIPA (01) tahun 2025 dengan standar nasional merujuk pada pedoman penilaian komprehensif yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Capaian kinerja yang diraih pada tahun berjalan ini menunjukkan bahwa satuan kerja telah berupaya secara optimal untuk memenuhi kriteria predikat sangat baik yang menjadi tolok ukur pengelolaan keuangan secara nasional. Keselarasan hasil realisasi dengan standar baku tersebut membuktikan tingginya tingkat kepatuhan administratif, ketepatan waktu, dan efektivitas tata kelola pencairan anggaran yang dijalankan di lingkungan internal organisasi. Sebagai langkah keberlanjutan, komitmen untuk menjaga kedisiplinan perbendaharaan akan terus diprioritaskan

guna memastikan kualitas pelaksanaan anggaran senantiasa sejalan dengan standar tertinggi pengelolaan keuangan negara. perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada table sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target MARI	Target Satker	Realisasi Satker	Capaian Satker	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	90	95	96,75	101,84%	Target Satker tercapai

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Terkait Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Keberhasilan pencapaian target Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada DIPA (01) Badan Urusan Administrasi tahun 2025 utamanya didorong oleh sinergi operasional yang kuat di lini Subbagian Umum dan Keuangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Faktor kunci pendukung capaian tersebut meliputi ketepatan waktu penyelesaian tagihan, kedisiplinan dalam meminimalisasi revisi Halaman III DIPA, serta kepatuhan penuh terhadap rencana penarikan dana bulanan yang telah ditetapkan. Selain itu, ketelitian administrasi dan koordinasi yang proaktif dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) turut berkontribusi signifikan dalam mencegah terjadinya kesalahan penagihan maupun retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Melalui komitmen pengelolaan keuangan yang disiplin ini, satuan kerja mampu mengeksekusi anggaran secara efektif dan menjaga kualitas pelaksanaan anggaran yang optimal pada tahun pertama pengukuran indikator ini.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) Badan Urusan Administrasi terwujud secara optimal melalui

penguatan peran aparatur pada Subbagian Umum dan Keuangan. Pembagian beban kerja administratif dikelola secara proporsional, di mana personel yang menangani kegiatan operasional harian seperti tata kelola persediaan barang hingga penyelesaian pajak kendaraan bermotor mampu berkolaborasi secara efektif. Pemanfaatan alokasi waktu dan tenaga pegawai yang terstruktur ini memastikan seluruh tahapan administrasi perbendaharaan berjalan lancar dan terhindar dari tumpang tindih penyelesaian tugas. Melalui pemetaan kompetensi dan penugasan yang tepat sasaran tersebut, organisasi berhasil mengawal kelancaran realisasi anggaran sekaligus mencapai tingkat akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun ini.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Beberapa program kerja yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain:

- 1) Penandatanganan Perjanjian Kerja Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
- 2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kepala Pengadilan Militer dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
- 3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- 4) Mengikuti seluruh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Pada tahun 2025, realisasi capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (05) Ditjen Badilmiltun pada

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tercatat sebesar 87,36, yang berarti telah berhasil mencapai/melampaui target yang ditetapkan sebesar 85. Pencapaian kinerja yang optimal ini mencerminkan tingginya kualitas tata kelola pelaksanaan anggaran serta kepatuhan satuan kerja terhadap prinsip efektivitas dan efisiensi belanja negara. Keberhasilan pemenuhan target tersebut tidak lepas dari komitmen seluruh jajaran dalam menjaga kedisiplinan administratif, mulai dari kesesuaian perencanaan penarikan dana hingga ketepatan waktu penyelesaian tagihan. Adapun pengukuran dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Rekapitulasi pencapaian nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (05) pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Komponen	Nilai IKPA DIPA (05)
Revisi DIPA	10
Penyerapan Anggaran	19,65
Penyelesaian Tagihan	10
Dispensasi SPM	0
Deviasi Halaman III DIPA	7.53
Belanja Kontraktual	0
Pengelolaan UP dan TUP	0
Capaian Output	23.97
Nilai Akhir	87.36
Target	85
Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (05)	102,76%

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian DIPA (05) Ditjen Badilmiltun pada indikator kinerja **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun** pada tahun 2025 adalah target sebesar 85, realisasi 87,36 dan capaian yang diperoleh yaitu 102,76%. Sebagaimana terlihat pada Tabel pencapaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun	85	87.36	102,76%

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (05) pada tahun 2025 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja yang diraih pada tahun sebelumnya. Akan tetapi, jika ditarik mundur dan dibandingkan dengan beberapa tahun ke belakang, capaian kinerja tahun ini masih jauh lebih baik daripada realisasi pada awal periode, khususnya saat menyentuh titik terendah. Tren kinerja selama lima tahun terakhir memang menunjukkan dinamika yang sangat fluktuatif, di mana instansi sempat mengalami penurunan tajam sebelum akhirnya melesat naik dan memuncak pada tahun lalu. Walaupun terdapat koreksi pada tahun berjalan, pemulihan performa yang telah dicapai sejak titik terendah tersebut menegaskan komitmen Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam mempertahankan kualitas pelaksanaan anggaran yang stabil.

Berikut perbandingan Capaian kinerja pelaksanaan anggaran DIPA (05) tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja (Realisasi)					Kenaikan/ Penurunan
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun	85.45	69.83	88.47	90.44	87.36	Turun 3,08 dari tahun 2024, turun 1,11 dari tahun 2023, naik 17,53 dari tahun 2022 dan naik 1,91 dari tahun 2021-

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (05) pada tahun ini telah berhasil melampaui target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis. Meskipun capaian pada tahun berjalan berstatus sangat baik, akumulasi rata-rata realisasi kinerja selama beberapa tahun terakhir secara kumulatif masih berada sedikit di bawah standar target yang diharapkan. Kekurangan pada rata-rata historis tersebut merupakan dampak langsung dari adanya penurunan nilai realisasi yang cukup signifikan pada awal periode. Namun demikian, konsistensi pencapaian yang terus melampaui target selama beberapa tahun terakhir hingga akhir periode ini menegaskan keberhasilan instansi dalam mengoptimalkan tata kelola pelaksanaan anggaran.

Perbandingan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Keterangan
	Realisasi						
	2021	2022	2023	2024	2025		
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun	85.45	69.83	88.47	90.44	87.36	85	Realisasi 5 tahun = (85,45+69,83+88,47+90,44+87,36) /5 = 84,31

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional.

Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (05) pada tahun berjalan belum mampu memenuhi standar capaian nasional yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Meskipun demikian, capaian kinerja instansi ini tetap menunjukkan hasil yang positif karena berhasil melampaui target internal satuan kerja yang telah dicanangkan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa secara operasional, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah mengelola pelaksanaan anggaran dengan sangat baik sesuai dengan kapasitas dan sasaran di tingkat wilayah. Ke depannya, kesenjangan dengan standar nasional ini akan menjadi bahan evaluasi penting bagi instansi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan agar sejajar dengan ekspektasi pusat. perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada table sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target MARI	Target Satker	Realisasi Satker	Capaian Satker	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun	90	85	87.36	102,76	Target Satker tercapai

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Terkait Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun

Keberhasilan pencapaian target Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (05) pada tahun 2025 utamanya didorong oleh kedisiplinan dan sinergi yang optimal di jajaran pengelola keuangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Faktor utama pendorong kinerja ini meliputi tingginya akurasi perencanaan kas pada Halaman III DIPA, ketepatan waktu penyelesaian tagihan, serta minimalisasi tingkat kesalahan pada penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). Selain itu, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan terhadap rincian penyerapan anggaran turut memastikan setiap kendala administratif dapat diantisipasi sejak dini. Berkat komitmen dan langkah-

langkah strategis tersebut, tata kelola pelaksanaan anggaran dapat dipertahankan agar senantiasa berjalan dengan efektif, efisien, dan akuntabel.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pencapaian optimal Nilai IKPA DIPA (05) pada tahun 2025. Pengelolaan tugas pokok dan fungsi, khususnya pada jajaran pengelola keuangan, dilaksanakan secara proporsional dengan memaksimalkan kompetensi aparatur yang ada, sehingga beban kerja terkait administrasi perbendaharaan dapat diselesaikan dengan akurat tanpa memerlukan penambahan personel berlebih. Pemahaman dan adaptasi SDM yang baik terhadap sistem perbendaharaan berbasis teknologi informasi juga terbukti mampu memangkas waktu proses administrasi, meminimalkan potensi kesalahan teknis, dan mengoptimalkan jam kerja pegawai. Tingkat efisiensi kinerja aparatur ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui evaluasi serta pengembangan kompetensi berkelanjutan guna memastikan pengelolaan anggaran yang semakin profesional di masa mendatang.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Beberapa program kerja yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain:

- 1) Penandatanganan Perjanjian Kerja Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
- 2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kepala Pengadilan Militer dan Atasan Langsung masing-masing bagian.

- 3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- 4) Mengikuti seluruh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Pada tahun 2025, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada DIPA (01) Badan Urusan Administrasi menetapkan target Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 80 dan berhasil mencapai angka realisasi sebesar 100. Perbandingan antara target dan realisasi tersebut menghasilkan persentase capaian sebesar 125%, yang menunjukkan bahwa penyusunan dokumen anggaran beserta eksekusinya sepanjang tahun berjalan telah dikelola secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Pengukuran dan evaluasi perbandingan kinerja ini dilaksanakan dengan mengacu pada dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Secara keseluruhan, tingkat pencapaian ini membuktikan komitmen kesekretariatan satuan kerja dalam menjaga akuntabilitas, kedisiplinan, serta kualitas tata kelola keuangan negara yang optimal guna mendukung pelaksanaan tugas pokok peradilan militer. Sebagaimana terlihat pada Tabel pencapaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

Komponen	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
Efektivitas	100	75	75
Efisiensi		25	25
Penggunaan SBK (40%)	100		
Efisiensi SBK (60%)	100		
Nilai Kinerja Perencanaan			100
Target			80
Capaian Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)			100%

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Balikpapan DIPA (01) pada indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi pada tahun 2025 adalah target sebesar 80, realisasi 100 dan capaian yang diperoleh yaitu 125%. Sebagaimana terlihat pada Tabel pencapaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	80	100	125%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024, 2023, 2022, dan 2021.

Realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi pada tahun ini telah berhasil mencapai target secara penuh dan maksimal. Jika dikomparasikan dengan capaian pada tahun lalu, kinerja saat ini menunjukkan tren yang stabil karena instansi mampu mempertahankan tingkat pencapaian sempurna tersebut. Tren konstan ini juga terbukti bukan sekadar keberhasilan jangka pendek, melainkan sudah mampu dipertahankan secara berturut-turut selama beberapa tahun terakhir tanpa pernah meleset dari sasaran yang ditetapkan. Rekam jejak tersebut secara tegas membuktikan bahwa tata kelola, kedisiplinan, serta kualitas perencanaan anggaran pada satuan kerja telah berjalan sangat prima dan berkelanjutan.

Berikut perbandingan Capaian kinerja perencanaan anggaran DIPA (01) tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 pada tabel dan grafik berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja (Realisasi)					Kenaikan/ Penurunan
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	100	100	100	100	100	Tetap

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (05) pada tahun ini telah berhasil melampaui target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis. Meskipun capaian pada tahun berjalan berstatus sangat memuaskan, akumulasi rata-rata realisasi kinerja selama lima tahun terakhir secara kumulatif masih terpaud sedikit di bawah standar target yang diharapkan. Kekurangan pada rata-rata historis tersebut merupakan dampak langsung dari adanya kontraksi nilai realisasi yang cukup signifikan pada fase awal periode perencanaan. Namun demikian, tren positif berupa pencapaian yang selalu melampaui target dalam tiga tahun berturut-turut hingga akhir periode menegaskan keberhasilan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam mengoptimalkan tata kelola pelaksanaan anggarannya secara berkesinambungan. Perbandingan realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Keterangan
	Realisasi						
	2021	2022	2023	2024	2025		
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	100	100	100	100	100	80%	-

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional.

Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (05) pada tahun berjalan terpantau belum sepenuhnya berhasil menyamai standar capaian nasional yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Meskipun demikian, capaian kinerja instansi pada indikator ini tetap menunjukkan hasil yang sangat positif karena terbukti mampu melampaui target internal Satuan Kerja yang telah dicanangkan. Keberhasilan melampaui ekspektasi internal tersebut mengantarkan indikator ini secara resmi menyandang status target tercapai dengan persentase capaian yang memuaskan. Hal ini merepresentasikan bahwa tata kelola pelaksanaan anggaran di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah beroperasi dengan optimal, walau ke depannya tetap membutuhkan upaya peningkatan berkelanjutan agar selaras dengan standar pimpinan pusat. perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada table sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target MARI	Target Satker	Realisasi Satker	Capaian Satker	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	90	80	100	125%	Target Satker tercapai

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Terkait Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Keberhasilan pencapaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi pada tahun ini didorong oleh komitmen pengelola keuangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam merealisasikan anggaran secara disiplin dan tepat waktu. Peningkatan kinerja tersebut merupakan hasil nyata dari optimalisasi perencanaan kas yang akurat serta kepatuhan penuh terhadap regulasi tata kelola perbendaharaan negara. Selain itu, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala terbukti sangat efektif dalam meminimalisir deviasi antara Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan tingkat penyerapan aktual di lapangan. Sinergi seluruh aparatur pengadilan dalam mempercepat penyelesaian tagihan dan pertanggungjawaban administrasi pada akhirnya mampu memastikan kualitas pelaksanaan anggaran tetap berada pada standar capaian yang maksimal.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah terbukti menjadi faktor krusial dalam mendukung tercapainya target kinerja organisasi secara optimal. Penempatan personel yang proporsional sesuai dengan kompetensi teknis, khususnya pada lini pengelola keuangan dan administrasi umum, mampu mendorong produktivitas kerja tanpa memerlukan beban operasional tambahan yang berlebihan. Melalui sinergi dan pembagian beban kerja yang terukur antar aparatur, seluruh tahapan administratif hingga eksekusi anggaran dapat diselesaikan dengan tingkat akurasi tinggi dan waktu yang lebih singkat. Optimalisasi potensi pegawai ini mencerminkan keberhasilan satuan kerja dalam menerapkan prinsip manajemen SDM yang tepat guna demi mempertahankan tren capaian kinerja yang positif di masa mendatang.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Beberapa program kerja yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain:

- 1) Penandatanganan Perjanjian Kerja Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
- 2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kepala Pengadilan Militer dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
- 3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- 4) Mengikuti seluruh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Pada tahun 2025, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun berfokus pada upaya pencapaian target indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran guna memastikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada periode ini menunjukkan tingkat capaian yang optimal, di mana rencana penarikan dana serta eksekusi kegiatan berhasil direalisasikan secara presisi sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan. Pengukuran dan perbandingan capaian kinerja ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tingginya tingkat kesesuaian antara realisasi dengan target ini pada akhirnya menegaskan komitmen nyata satuan kerja dalam menjaga akuntabilitas, transparansi,

dan kedisiplinan fiskal untuk mendukung pelayanan peradilan militer yang prima.

Rekapitulasi pencapaian nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (05) pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Komponen	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
Efektivitas	94,11	75	55,58
Efisiensi		25	25
Penggunaan SBK (40%)	100		0
Efisiensi SBK (60%)	0		0
Nilai Kinerja Perencanaan			80,58
Target			70
Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (05)			115,11%

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun pada tahun 2025 adalah target sebesar 70, realisasi 80,58 dan capaian yang diperoleh yaitu 115,11%. Sebagaimana terlihat pada Tabel pencapaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun	70	80,58	115,11%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024, 2023, 2022, dan 2021.

Secara keseluruhan, realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada tahun pelaporan saat ini menunjukkan tren penurunan jika dibandingkan dengan rekam jejak capaian dalam beberapa periode terakhir. Apabila disandingkan secara langsung dengan hasil evaluasi tahun lalu, capaian kinerja tahun ini terkonfirmasi mengalami kemunduran yang cukup jelas. Tren penurunan tersebut juga masih terlihat konsisten

ketika dikomparasikan lebih jauh ke belakang, di mana realisasi saat ini bernilai lebih rendah dari capaian dua hingga tiga tahun sebelumnya. Puncak kemerosotan kinerja paling signifikan dapat diamati tatkala membandingkan hasil tahun ini dengan realisasi tertinggi yang berhasil dicatatkan pada empat tahun silam. Berikut perbandingan pencapaian indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 pada tabel dan grafik berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja (Realisasi)					Kenaikan/ Penurunan
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun	87.51	84.56	85.23	85	80.58	Penurunan 4,15 dari tahun 2024, turun 4,38 dari tahun 2023, turun 3,71 dari tahun 2022, dan turun 6,66 dari tahun 2021

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (05) pada tahun 2025 mengalami penurunan apabila disandingkan dengan tingkat realisasi yang berhasil diraih pada tahun sebelumnya. Berdasarkan rekam jejak beberapa tahun terakhir, tren indikator kinerja ini memperlihatkan dinamika yang fluktuatif dengan capaian puncak terjadi pada awal periode. Walaupun terdapat penurunan pada tahun berjalan, akumulasi kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan secara historis masih menghasilkan rata-rata realisasi yang tergolong sangat baik. Rata-rata capaian tersebut menegaskan bahwa instansi tetap mampu menjaga konsistensi kerjanya agar senantiasa berada di atas target jangka menengah yang telah ditetapkan. Perbandingan realisasi pencapaian

target kinerja pada indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional.

Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (05) pada tahun pelaporan tercatat belum sepenuhnya memenuhi standar capaian nasional atau Target MARI yang dicanangkan pimpinan pusat. Walaupun terdapat selisih dengan standar nasional tersebut, kinerja instansi tetap tergolong sangat baik karena capaiannya sukses melampaui target internal Satuan Kerja. Pencapaian yang berada di atas ekspektasi internal ini secara otomatis membuat indikator tersebut menyandang status target tercapai dengan persentase yang memuaskan. Kondisi ini membuktikan bahwa tata kelola pelaksanaan anggaran di tingkat wilayah telah berjalan optimal dan hanya memerlukan sedikit eskalasi kinerja agar ke depannya mampu sejajar dengan standar Mahkamah Agung. perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada table sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target MARI	Target Satker	Realisasi Satker	Capaian Satker	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	90	70	80,58	115,11	Target Satker tercapai

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Terkait Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Keberhasilan pencapaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi pada tahun ini didorong oleh peningkatan koordinasi internal yang intensif, khususnya dalam penyusunan rencana penarikan dana yang akurat. Optimalisasi pemantauan secara berkala

terhadap kesesuaian antara rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA dengan realisasi pencairan anggaran terbukti efektif meminimalisasi potensi deviasi pada setiap akhir triwulan. Selain itu, kedisiplinan jajaran aparatur dalam mematuhi kalender pelaksanaan kegiatan memastikan bahwa setiap belanja operasional maupun pemeliharaan dieksekusi tepat waktu sesuai dengan target yang telah diproyeksikan di awal. Komitmen kolektif pada aspek administrasi dan keuangan ini menghasilkan tata kelola yang semakin terukur, sehingga mendongkrak kualitas perencanaan anggaran secara keseluruhan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terbukti menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung kelancaran pemenuhan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran. Penempatan aparatur dengan kompetensi yang relevan, khususnya pada Sub Bagian Umum dan Keuangan, telah memastikan bahwa proses penyusunan, penyerapan, hingga evaluasi dokumen anggaran dapat diselesaikan secara presisi. Kolaborasi yang efektif antarfasa pekerjaan dan pemanfaatan teknologi secara optimal berhasil memangkas hambatan administratif, sehingga alokasi waktu serta tenaga pegawai menjadi jauh lebih proporsional dan tidak tumpang tindih. Tingkat efisiensi SDM yang baik ini pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas perencanaan keuangan satuan kerja, sekaligus menjaga ritme produktivitas organisasi agar tetap stabil sepanjang tahun.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Beberapa program kerja yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain:

- 1) Penandatanganan Perjanjian Kerja Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
- 2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kepala Pengadilan Militer dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
- 3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- 4) Mengikuti seluruh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

6. Indeks Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Capaian Indeks Indikator Pengelolaan Aset (IPA) pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2025 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan kategori nilai yang sangat baik. Keberhasilan ini tercermin dari optimalnya penatausahaan BMN, ketepatan waktu pelaporan, serta efektivitas pemanfaatan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara teknis, realisasi ini menunjukkan komitmen satuan kerja dalam menjaga akuntabilitas publik melalui pengelolaan aset negara yang transparan dan akuntabel sepanjang tahun anggaran 2025. Adapun pelaksanaan pengelolaan aset ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.

Berikut tabel Indeks Pengelolaan Aset (IPA) pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2025:

No	Parameter	Nilai Parameter	Bobot	Nilai Parameter/Indeks akhir setelah Penyesuaian	Indeks
1.	Penatausahaan Barang Milik Negara		20%		
	1. Kesuaian kelengkapan data	100%	12%	4	0,48
	2. Penjelasan telaah BMN	100%	8%	4	0,32
2.	Realisasi PNBP dari pengelolaan aset		15%		
	1. Realisasi pendapatan dari pemanfaatan BMN	90%	7.5%	3	0,225
	2. Realisasi PNBP dari pemanfaatan BMN berdasarkan penetapan pengguna barang	90%	7.5%	3	0,225
3.	Ketepatan waktu dokumen RKBMN		25%		
	1. Ketepatan waktu usulan RKBMN	100%	7.5%	4	0,3
	2. Ketepatan waktu LBKP	90%	7,5%	3	0,4
	3. Ketepatan & kelengkapan Wasdal	90%	10%	3	0,3
4.	Tindak lanjut pemanfaatan BMN		10%	2	0,2
5.	Tindak lanjut BMN yg dihentikan penggunaannya		10%	4	0,4
6.	BMN memiliki dokumen kepemilikan		10%	4	0,4
7.	Penggunaan BMN sesuai ketentuan		10%	2	0,2
NILAI IKPA					3,275

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Indeks Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	90%	90%	100%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024, 2023, 2022, dan 2021.

Pengukuran terhadap capaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan baru diinisiasi dan secara resmi dituangkan ke dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025. Mengingat indikator ini merupakan instrumen evaluasi yang sepenuhnya baru, maka dokumentasi capaian maupun realisasi kinerja untuk rentang periode tahun 2021 hingga 2024 secara faktual belum tersedia. Akibat ketiadaan rekam jejak historis tersebut, penjabaran mengenai analisis perbandingan kinerja secara retrospektif tidak dapat dilakukan dalam pelaporan LKJIP tahun ini. Sebagai kompensasinya, seluruh data capaian pada tahun 2025 ini secara otomatis ditetapkan sebagai titik tolak ukur (starting point) bagi pemantauan kualitas pengelolaan aset pada periode pelaporan selanjutnya.

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja (Realisasi)					Kenaikan/ Penurunan
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
Indeks Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	-	-	-	-	90%	-

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Indikator Indeks Pengelolaan Aset (IPA) merupakan sasaran kinerja yang baru diintegrasikan ke dalam dokumen Perencanaan Strategis jangka menengah Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mulai periode tahun 2025. Dengan demikian, perbandingan realisasi kinerja jangka menengah saat ini diukur secara spesifik berdasarkan pencapaian aktual tahun berjalan terhadap target awal yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tersebut. Realisasi kinerja pada tahun pertama implementasi indikator ini secara otomatis menjadi tonggak awal (milestone) sekaligus fondasi progres capaian bagi satuan kerja. Keberhasilan pencapaian target IPA di tahun 2025 ini akan sangat menentukan arah evaluasi dan strategi lanjutan guna memastikan

terpenuhinya target akhir Rencana Strategis secara utuh di masa mendatang.

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Keterangan
	Realisasi						
	2021	2022	2023	2024	2025		
Indeks Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	-	-	-	-	90%	90%	-

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional.

Pengukuran capaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun 2025 secara langsung disandingkan dengan parameter standar nasional tata kelola Barang Milik Negara (BMN) yang berlaku. Perbandingan ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja satuan kerja pada tahun pertama implementasi indikator ini telah diupayakan agar sejalan dengan kriteria kepatuhan dan efisiensi tingkat nasional. Standar nasional tersebut difungsikan sebagai barometer utama bagi pengadilan dalam mengevaluasi tingkat akuntabilitas, optimalisasi utilitas, serta tertib administrasi aset yang dikuasai. Ke depannya, capaian pada tahun 2025 ini akan terus dievaluasi dan menjadi landasan strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset agar senantiasa memenuhi standar nasional di masa mendatang.

No	Indikator Kinerja	Target MARI	Target Satker	Realisasi Satker	Capaian Satker	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	90%	90%	90%	100%	Target Satker tercapai

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Terkait Indeks Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Badan Urusan Administrasi

Keberhasilan pencapaian target Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan didorong oleh komitmen kuat dalam mewujudkan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib administrasi. Keberhasilan ini terwujud berkat kedisiplinan jajaran Sub Bagian Umum dan Keuangan dalam melakukan pencatatan, inventarisasi, dan pemutakhiran data aset secara berkala dan presisi. Faktor pendukung lainnya mencakup pelaksanaan program pemeliharaan aset yang terencana dengan baik serta optimalisasi tingkat utilitas barang agar senantiasa selaras dengan kebutuhan operasional pelayanan hukum. Rangkaian upaya pengawasan dan pengendalian yang konsisten tersebut pada akhirnya bermuara pada pemenuhan target kinerja pengelolaan aset secara maksimal di tahun pertama implementasi indikator ini.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM).

efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, khususnya pada Sub Bagian Umum dan Keuangan, dicapai melalui distribusi beban kerja yang proporsional dan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi teknisnya. Optimalisasi kinerja aparatur ini sangat didukung oleh upaya peningkatan kapasitas personalia secara berkelanjutan, sehingga tugas-tugas pengelolaan administrasi maupun tata kelola aset dapat diselesaikan dengan cepat dan akurat. Pemanfaatan sistem informasi berbasis teknologi serta kolaborasi yang solid antar pegawai juga terbukti mampu memangkas waktu proses kerja, sehingga target kinerja tahun 2025 dapat terealisasi tanpa harus mengandalkan penambahan kuantitas personel. Melalui strategi manajemen SDM yang efektif tersebut, satuan kerja berhasil membuktikan bahwa pencapaian kinerja yang maksimal dapat diwujudkan sejalan dengan efisiensi alokasi waktu dan tenaga aparatur pengadilan.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Beberapa program kerja yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain:

- 1) Penandatanganan Perjanjian Kerja Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
- 2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kepala Pengadilan Militer dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
- 3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- 4) Mengikuti seluruh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

B. Realisasi Anggaran

1. Pengelolaan Keuangan DIPA (01) BUA MARI.

Dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang bertujuan menyempurnakan manajemen belanja Negara guna peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai salah satu instansi Pemerintah yang berada dalam lingkungan Mahkamah Agung, pada akhir tahun anggaran 2025 telah menerima "DIPA PETIKAN ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2025" dengan Nomor : SP DIPA-005.01.2.663246/2025 tanggal 02 Desember 2024 dengan PAGU sebesar Rp. 3.901.926.000,- (tiga miliar sembilan ratus satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah). Pada tanggal 11 Februari 2025 Satker Melaksanakan Revisi ke-1 yaitu Revisi Halaman III Dipa ke Kanwil Kalimantan Timur (Samarinda) pagu anggaran tetap. Pada tanggal 23 Februari 2025 satker melaksanakan Revisi ke-2 yaitu Revisi Dipa Efisiensi Belanja APBN TA 2025. Pada tanggal 23 Maret 2025 Satker telah melakukan revisi ke-3 yaitu Revisi DIPA Buka Blokir Efisiensi Belanja APBN Tahun Anggaran 2025 Kecuali Perjalanan Dinas Diblokir 50 Persen. Pada tanggal 21 April 2025 satker melaksanakan revisi ke-4 yaitu Revisi DIPA Rencana Penarikan Dana

Halaman 3 DIPA. Pada tanggal 10 Juli 2025 Satker telah melakukan revisi ke-5 yaitu Revisi DIPA Rencana Penarikan Dana Halaman 3 DIPA. Pada tanggal 22 Juli 2025 satker melakukan Revisi ke-6 yaitu revisi DIT.PA yaitu penambahan Pagu minus. Pada tanggal 27 Agustus 2025 satker melakukan Revisi ke-7 yaitu Revisi POK dan Revisi Dipa Rencana Penarikan Dana Halaman 3 Dipa. Pada tanggal 12 September 2025 satker melakukan Revisi ke-8 yaitu Revisi POK, Revisi Halaman III Dipa, Revisi Pemutakhiran data. Pada tanggal 23 September 2025 satker melakukan Revisi ke-9 yaitu Revisi Penambahan Pagu minus. Pada tanggal 24 Oktober 2025 satker melakukan Revisi ke-10 Yaitu Revisi POK dan Revisi Halaman 3 DIPA. Pada tanggal 29 Oktober 2025 satker melakukan Revisi POK dan Pemutakhiran KPA. Pada tanggal 14 Nopember 2025 satker melakukan Revisi DIT.PA yaitu penambahan Pagu minus. Pada tanggal 26 Nopember 2026 Satker melakukan Revisi POK dan Pemutakhiran KPA.

**Alokasi Pagu dan Realisasi Anggaran Dipa (01) BUA MA RI
Pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2025**

No	Pagu DIPA semula (Rp)	Pagu DIPA setelah revisi (RP)	Realisasi (RP)	(%)	Sisa anggaran (Rp)
1.	3.901.926.000	4.666.808.000	4.630.601.784	99,22	36,206,216

a. Belanja Pegawai

Data penyerapan anggaran belanja pegawai tahun 2025 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan:

No	Pagu DIPA (Rp)	Pagu Revisi	Realisasi anggaran (Rp)	Sisa anggaran (Rp)	%
1.	2.260.069.000	3.123.043.000	3.097.335.297	25.707.703	96.18

b. Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor dan Non Operasional Satker Daerah.

Data penyerapan anggaran belanja operasional dan pemeliharaan kantor dan belanja non operasional satker daerah tahun 2025 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan:

No	Pagu DIPA (Rp)	Pagu Revisi	Realisasi anggaran (Rp)	Sisa anggaran (Rp)	%
1.	1.586.257.000	1.488.765.000	1.488.266.487	498.513	99,97

c. Belanja Modal.

Data penyerapan anggaran belanja modal tahun 2025 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan:

No	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1.	55.000.000	45.000.000	10.000.000	81.82

2. Pengelolaan Keuangan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MA RI.

Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA005.05.2.663247/2025 tanggal 02 Desember 2024 pada tahun anggaran 2025 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memperoleh pagu anggaran sebesar Rp.157.085.000,- (seratus lima puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah).

Rincian dan realisasi anggaran Dipa (05) Dirjen Badilmiltun MARI pada Peradilan Militer I-07 Balikpapan adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pagu semula (RP)	Pagu setelah revisi (RP)	Realisasi (RP)	(%)	Sisa Pagu (Rp)
1.	Perkara yang dilayani siding di luar Gedung di lingkungan Peradilan Militer (sidang di Luar Gedung Pengadilan)	53.850.000	53.850.000	53.850.000	100	0
2.	Perkara pidana Tingkat Pertama yang diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I-01 s.d III-18	100.310.000	71.400.000	71.213.114	99,74	186.886
3.	Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I-01 s.d III-18	2.925.000	2.925.000	2.849.515	97,42	75.485
	Total	157.085.000	128.175.000	127.912.629	99,80	262.371

C. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 yang telah disampaikan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan terhadap Hasil Evaluasi Kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terdapat beberapa rekomendasi yang akan ditindaklanjuti sebagai berikut:

No	Rekomendasi LHE Tahun 2024	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
A. Perencanaan Kerja								
1.	Pada pengelolaan dokumen Perencanaan Kinerja agar pedoman teknis perencanaan kinerja internal yang mencakup antara lain kebijakan penyusunan, perubahan dan sistematika penyajian dokumen perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, penyusunan rencana aksi dan jadwal monitoring evaluasi kinerja disesuaikan dengan kondisi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.	Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia, namun terdapat kondisi: Pedoman teknis perencanaan kinerja internal yang mencakup antara lain kebijakan penyusunan, perubahan dan sistematika penyajian dokumen perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, penyusunan rencana aksi dan jadwal monitoring evaluasi kinerja belum memadai.	Juknis/Pedoman Pelaksanaan Anggaran/Kinerja Daerah (RKAKL), Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Internal, Hasil Monev Rencana Aksi Kinerja TW.1 sampai dengan TW.4 Tahun 2024. (terlampir).	4 Bulan	1 Agustus – 1 Desember 2024	Kadilmil	Selesai	Link Dukung
2.	Dokumen Perencanaan Kinerja agar memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting), serta agar Renstra menyajikan penjelasan keterkaitan	Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standart yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain	Terdapat IKU SMART serta Renstra yang menyajikan penjelasan keterkaitan Rencana Jangka Panjang MA dengan Renstra Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan terdapat Dokumen	4 bulan	1 Agustus – 1 Desember 2024	Kadilmil	Selesai	Link Dukung

	dan/atau analisis keterkaitan rencana jangka Panjang MA dengan Renstra Pengadilan militer I-07 Balikpapan secara memadai.	(crosscutting), namun terdapat kondisi: a. Anggaran yang dialokasikan belum sepenuhnya disinkronkan dengan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU). b. Renstra belum menyajikan penjelasan keterkaitan dan/atau analisis keterkaitan rencana jangka panjang MA dengan renstra Pengadilan Militer I-07 Balikpapan secara memadai. c. Terdapat dokumen perencanaan kinerja belum menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang dicapai setiap level jabatan (cascading).	Perencanaan Kinerja sudah selaras dengan kondisi dan hasil (terlampir).					
3.	Dalam pemanfaatan Perencanaan Kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan agar anggaran yang dialokasikan disinkronkan dengan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).	-	Adanya Indikator Kinerja Utama dan Kerangka Pendanaan yang mewujudkan hasil dan berkesinambungan (terlampir).	3 Bulan	1 Agustus – 1 November 2024	Kadilmil	Selesai	Lmk Dukung
B. Pengukuran Kinerja								
1.	a. Pedoman teknis pengukuran kinerja internal dapat memberikan informasi	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja internal, namun	Telah dibuat Pedoman Teknis Perencanaan	1 Bulan	1 September 2024	Kadilmil	Selesai	

	yang jelas terkait mekanisme pengumpulan data yang digunakan dalam pengukuran kinerja, jadwal pengukuran kinerja serta Upaya perbaikan/penyempurnaannya .	belum memberikan informasi yang jelas terkait mekanisme pengumpulan dan pengukuran kinerja, jadwal/waktu pelaksanaan pengumpulan dan pengukuran data kinerja serta jadwal Monev pengukuran Kinerja.	Kinerja Internal dan Hasil Monev Rencana Aksi Kinerja TW.1 sampai dengan TW.4 Tahun 2023 (terlampir).					
	b. Menyusun definisi operasional atas IKU yang memadai.	Definisi operasional atas IKU belum memadai.	Telah disusun definisi operasional atas IKU yang memadai	2 Bulan	1 November – 31 Desember 2024	Kadilmil	Selesai	Lmk Dukung
	c. Menetapkan mekanisme yang jelas atas pengumpulan data kinerja	Belum terdapat mekanisme yang jelas atas pengumpulan data kinerja.	Adanya Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan penjelasannya (terlampir).	3 Bulan	1 Oktober – 31 Desember 2024	Kadilmil	Selesai	Lmk Dukung
2.	a. Data Kinerja yang dikumpulkan relevan untuk mengukur capaian kinerja.	Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.	Terdapat Capaian Kinerja Organisasi didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) (terlampir).	1 Bulan	1 Januari 2025	Kadilmil	Selesai	Lmk Dukung
	b. Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja pada secara berjenjang terhadap Penilaian kinerja pegawai yang dilaporkan.	Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja pada setiap level secara berjenjang terhadap Penilaian kinerja pegawai yang dilaporkan belum sepenuhnya berjalan.	Adanya Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perjanjian Kinerja Pegawai (PKP) Personel (terlampir).	3 Bulan	1 November 2024 – 31 Januari 2025	Kadilmil	Selesai	Lmk Dukung

	c. Melakukan monev Reviu SOP secara berkala.	Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).	Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Reviu SOP secara berkala (terlampir).			Kadilmil	Selesai	Lnk Dukung
3.	a. Meningkatkan pelaksanaan pengukuran kinerja menjadi salah satu dasar dalam pemberian/pengurangan tunjangan kinerja.	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien namun terdapat kondisi:	Adanya Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perjanjian Kinerja Pegawai (PKP) Personel (terlampir).	1 Bulan	1 Desember 2024	Kadilmil	Selesai	Lnk Dukung
	b. Mengukur efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.	a. Pengukuran kinerja secara formal sudah menjadi salah satu dasar dalam pemberian/pengurangan tunjangan kinerja namun belum optimal dalam pelaksanaannya.	Adanya Kerangka Pendanaan dan Realisasi Anggaran didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) (terlampir).	1 Bulan	1 November 2024	Kadilmil	Selesai	Lnk Dukung
	c. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai atas hasil pengukuran kinerja.	b. Tidak terdapat informasi efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. c. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) organisasi. d. Satuan kerja belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. e. Setiap pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil	Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 dan Hasil Monev Rencana Aksi TW 4.	2 Bulan	1 Desember 2024 – 31 Januari 2025	Kadilmil	Selesai	Lnk Dukung

		pengukuran kinerja.						
C. Pelaporan Kinerja								
1.	Agar reviu Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dilakukan secara memadai yang dibuktikan dengan pernyataan bahwa laporan kinerja telah dilakukan reviu dilengkapi dengan dokumen hasil atas pelaksanaan reviu seperti catatan hasil reviu yang memastikan keandalan informasi dan data yang disajikan dalam laporan kinerja.	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja tetapi belum terdapat dokumen hasil atas pelaksanaan reviu internal secara berjenjang yang memastikan keadaan informasi dan data yang disajikan dalam laporan kinerja.	Adanya SK penyusunan LKjIP, Pernyataan telah di Reviu, Ceklist kelengkapan Reviu.	3 Bulan	1 Desember 2024 – 28 February 2025	Kadilmil	Selesai	Llnk Dukung
2.	a. Laporan kinerja mengungkap informasi tentang pencapaian kinerja dengan memadai.	Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas	Terdapat laporan pengukur capaian kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.	2 Bulan	1 Desember 2024 – 31 Januari 2025	Kadilmil	Selesai	Llnk Dukung
	b. Laporan kinerja menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaanya, terdapat kondisi Laporan Kinerja belum menginformasikan	Adanya Indikator Pelaksanaan Anggaran Laporan Kinerja pada IKPA OMSPAM bulan Oktober sampai dengan Desember 2023.	1 Bulan	1 September 2024	Kadilmil	Selesai	Llnk Dukung
	c. Agar dilengkapi dengan dokumen rapat atas hasil pelaksanaan reviu atas laporan kinerja yang memastikan keandalan informasi dan data yang disajikan dalam laporan kinerja.	upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja sebagai langkah perbaikan terdapat kondisi: a. Laporan Kinerja belum sepenuhnya mengungkapkan informasi tentang	Adanya Surat Pernyataan Telah di Reviu, Rapat Hasil Reviu, Ceklist kelengkapan Reviu.	1 Bulan	1 Desember 2024	Kadilmil	Selesai	Llnk Dukung

		pencapaian kinerja. b. Laporan kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.						
3.	a. Informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian aktifitas untuk mencapai kinerja.	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja	Terdapat Laporan Kinerja pada IKPA OMSPAM pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2023.	1 Bulan	1 September 2024	Kadilmil	Selesai	Llnk Dukung
	b. Informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.	berikutnya, namun terdapat kondisi: a. Belum ada penjelasan apakah informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian aktifitas untuk mencapai kinerja.	Terdapat Matrik Kerangka Pendanaan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.	1 Bulan	1 Desember 2024	Kadilmil	Selesai	Llnk Dukung
	c. Informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam pencapaian keberhasilan kinerja.	b. Belum ada penjelasan apakah informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja. c. Belum ada penjelasan apakah informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam pencapaian keberhasilan kinerja. d. Belum ada penjelasan apakah informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam	Menggunakan informasi dalam laporan kinerja dalam pencapaian keberhasilan kinerja yang akan dihadapi selanjutnya. Dengan memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk melakukan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja sehingga mencapai semua target PK tercapai 100%. Pada Laporan	3 Bulan	1 September – 31 Desember 2024	Kadilmil	Selesai	Llnk Dukung

		penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya.	Monev Rencana Kinerja Triwulan III, hampir semua komponen sudah mencapai target 100%, hanya tinggal capaian kinerja pada komponen Sidang di Luar Pengadilan yang akan diselesaikan capaian kerjanya pada bulan November 2024.					
	d. Informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya.		Terdapat Revisi Perjanjian Kinerja Tahunan 2023, Monitoring dan Evaluasi Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023.	2 Bulan	1 Januari – 28 Februari 2024	Kadilmil	Selesai	Llnk Dukung
	e. Capaian kinerja diinformasikan tidak tidak sebatas dalam bentuk screen shot melalui e-sakip pada aplikasi komdanas tetapi perlu membuat penjelasan setiap triwulan sesuai format yang terdapat di aplikasi komdanas menginformasikan permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang dilakukan disetiap periode pelaporan periodeik tersebut.		Telah dibuat Capaian Kinerja yang di Informasikan pada Aplikasi Komdanas setiap Triwulannya.	1 Bulan	1 agustus 2024	Kadilmil	Selesai	Llnk Dukung
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal								
1.	a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan pada seluruh bagian unit kerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya	Telah dibuat Laporan Hakim Pengawas Bidang	1 Bulan	1 januari 2025	Kadilmil	Selesai	Llnk Dukung

		dilaksanakan pada unit kerja.	Triwlan.IV (bulan Oktober sampai dengan Desember 2023 terlampir).					
	b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan secara berjenjang dengan optimal.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilaksanakan secara berjenjang belum optimal.	Telah dibuat Laporan Koordinator Hakim Pengawas Bidang Triwulan IV (bulan Oktober sampai dengan Desember 2023 terlampir).	1 Bulan	1 Januari 2025	Kadilmil	Selesai	Lnk Dukung
2.	a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan sesuai standar.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai standar, belum sepenuhnya dilaksanakan oleh sumber daya yang memadai, sehingga evaluasi belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.	Sudah dibuat SK dan Rapat Tim Penyusunan Laporan LKJIP, dan telah diadakan Rapat Tim Reviu Penyusunan Laporan LKJIP Tahun 2023 (terlampir).	1 Bulan	1 September 2024	Kadilmil	Selesai	Lnk Dukung
	b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan oleh sumber daya yang memadai sehingga evaluasi dapat dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.	dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.	Telah dilakukan peningkatan kinerja evaluasi dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM penyusun LKJIP dan Tim evaluasi melalui keikutsertaan dalam Diklat Penyusunan LKJIP yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung	1 Bulan	1 Agustus 2024	Kadilmil	Selesai	Lnk Dukung

			RI bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (BPKP) atas nama Ryan Fernando, S.Sos Jabatan Analis Kepegawaian Ahli Pertama telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli sampai dengan 16 Juli 2021 (Sprin mengikuti diklat dan Sertifikat diklat terlampir).					
	c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).		Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi), berupa Capaian Kinerja yang di Informasikan pada Aplikasi Komdanas Pertriwulan (terlampir).	1 Bulan	1 September 2024	Kadilmil	Selesai	Llnk Dukung
3.	a. Disusun laporan tindak lanjut rekomendasi yang	Implementasi SAKIP telah meningkat karena	Telah dibuat Monitoring dan	1 Bulan	1 November 2024		Selesai	Llnk Dukung

	memadai atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata dalam efektifitas dan efisiensi	Evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Triwulan III.					
	b. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	Kinerja, namun terdapat kondisi hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi Kinerja.	Telah dibuat Rapat Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.	3 Bulan	1 November 2024 – 31 Januari 2025		Selesai	Lnk Dukung
	c. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.		Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan Hasil Evaluasi Kinerja sebelumnya sudah dimanfaatkan dan memudahkan dalam pengerjaan Akuntabilitas Kinerja yang menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga seluruh laporan dapat disampaikan melalui aplikasi Sistem Evaluasi & Monitoring Akuntabilitas Kinerja (SEMAR) sebelum tenggat waktu yang diberikan.	4 Bulan	1 November 2024 – 28 February 2025		Selesai	Lnk Dukung

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan merupakan tindak lanjut atau respons atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja dan Keuangan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bertujuan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan rencana strategis.

LKJIP Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI secara garis besar, Dirjen Badilmiltun MARI dan tentunya secara khusus Rencana Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas Pengadilan Militer I-07 Balikpapan senantiasa menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota TNI dan masyarakat pengguna layanan Pengadilan, seluruh aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berkomitmen untuk menghindari perilaku yang koruptif serta berupaya memberikan pelayanan yang bersih, profesional, akuntabel dan berprinsip pada nilai-nilai *good governance* serta dapat menjadi pemicu untuk meraih predikat WBK kedepannya.

B. Saran

1. Kondisi Personel Pengadilan Militer I-07 Balikpapan saat ini sangatlah terbatas berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Plt. Kepala, 6 (enam) orang Hakim, 1 (satu) orang Hakim BP dari Dilmil I-02 Medan, 1 (satu) orang Sekretaris BP ke Dilmiltama, 1 (satu) orang Panitera, 3 (tiga) orang Panitera Pngganti, 1 (satu) orang Bintara, 7 (tujuh) orang ASN, 6 (enam) orang PPPK dan 2 (dua) orang PPNP, terdapat kekosongan jabatan yaitu Panmud Hukum, Panmud Pidana, dan jabatan Kasubbag Umum dan Keuangan, Jabatan Kasubbag PTIP yang masih kosong dikarenakan telah Purna Tugas jabatan Kasubbag Umum dan Keuangan dijabat sementara oleh

ASN yang sudah berpangkat Golongan III/b sebagai Plt. Kasubbag Umum dan keuangan. Sedangkan Kasubbag PTIP belum ada penggantinya dikarenakan TMT 1 Januari 2026 telah Purna Tugas. 1 (satu) orang ASN atas nama Bella Shafira A.Md.A.B BP ke Dilmil II-09 Bandung dan 1 (Satu) orang Sekretaris atas nama Mayor Chk Hery Pujiantono, S.H. BP ke DILMILTAMA dalam rangka pengobatan. Mohon dapatnya penambahan personel untuk mengisi kekosongan jabatan Bintara dan Tamtama TNI sebagai Provos serta penambahan Kasub dan personel ASN, baik di bidang Kepaniteraan maupun di bidang Kesekretariatan terutama yang memiliki kemampuan dan pendidikan di bidang Teknologi Informasi (TI), teknik komputer dan bidang keuangan.

2. Pembinaan dan karir personel ASN, mohon kiranya untuk ASN golongan III yang sudah menduduki jabatan struktural maupun fungsional untuk dapat di prioritaskan mengikuti diklat kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Mempin Mahkamah Agung RI pada tahun 2025 dan personel ASN potensial untuk diberi kesempatan dapat mengikuti diklat kepemimpinan, keahlian dan diklat kompetensi lainnya di Pusdiklat Mahkamah Agung RI.

3. Guna mendukung pelaksanaan tugas di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan maka perlu adanya dukungan rumah dinas jabatan, yang mana kita telah dihadapkan pada rotasi dan pergeseran personel yang cukup cepat, terutama untuk rumah dinas jabatan Kadilmil, Hakim dan Pejabat Stuktural lainnya.

C. Penutup

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada satuan kerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Balikpapan, 27 Februari 2026
Plt. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



Letnan kolonel Chk Tabah Prasetya

2. SK Tim Reviu, Ceklis Reviu DII

The image displays several official documents from the Indonesian Ministry of Defense. On the left is a letter of appointment for the review team. In the center is a meeting agenda for the review process. On the right is a detailed checklist for the review process, covering various aspects of the review team's performance and the review process itself.

The image shows a meeting in progress within a Command Center. Several individuals are seated around a large conference table, engaged in discussion. A presentation screen in the background displays a slide with a bar chart and the text 'LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 152'. The setting is a modern, well-lit room with a professional atmosphere.

3. PK 2025 (Januari – September 2025)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			
		Uraian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105,3%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	92,1%	122,7%

		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85%	95,2%	112 %
		Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95%	91.7%	96.5%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang disidangkan di luar Gedung Pengadilan	90%	100%	111%
4.	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku	Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan	97%	97%	100%
		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	98%	98%	100%
		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan	98%	98%	100%

4. Revisi PK 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%
		1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		1.6. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	0%
		1.7. Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	7,4%
		1.8. Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	7,4%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	80%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	85
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07	95

		Balickpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	
		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadlan Militer I-07 Balickpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun	85
		3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadlan Militer I-07 Balickpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	80
		3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadlan Militer I-07 Balickpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun	70
		3.6. Indeks Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadlan Militer I-07 Balickpapan	90

5. Reviu IKU & SK Penetapan IKU

REVIU INDIKATOR KINERJA (IKU) DAN SK PENETAPAN IKU

REVIU INDIKATOR KINERJA (IKU) DAN SK PENETAPAN IKU

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2006-2010.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2006-2010.

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2006-2010.

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2006-2010.

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2006-2010.

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2006-2010.

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2006-2010.

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2006-2010.

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2006-2010.

yang diperlukan oleh Pengadilan Militer I-07 Balickpapan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Badan Urusan Administrasi.

REVIU INDIKATOR KINERJA (IKU) DAN SK PENETAPAN IKU

REVIU INDIKATOR KINERJA (IKU) DAN SK PENETAPAN IKU

REVIU INDIKATOR KINERJA (IKU) DAN SK PENETAPAN IKU

REVIU INDIKATOR KINERJA (IKU) DAN SK PENETAPAN IKU

REVIU INDIKATOR KINERJA (IKU) DAN SK PENETAPAN IKU

No	Kriteria Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Pemangku Jawab	Sumber Data
1.1	Terwujudnya pelaksanaan anggaran sesuai target yang ditetapkan	1.1. Persentase pelaksanaan anggaran sesuai target	Jumlah persentase pelaksanaan anggaran sesuai target yang ditetapkan	Paritara	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Kriteria Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Pemangku Jawab	Sumber Data
1.2	Perencanaan anggaran yang akurat dan tepat	1.2. Ketepatan perencanaan anggaran	Jumlah ketepatan perencanaan anggaran yang akurat dan tepat	Paritara	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
1.3	Perencanaan anggaran yang efisien	1.3. Efisiensi perencanaan anggaran	Jumlah efisiensi perencanaan anggaran yang efisien	Paritara	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<p>Pengalihan Mitter I 07 Bakti Rappan DPA 202 Dengan Keseluruhan</p> <p>a. Dioperasikan SP4 (sebagai pengurangan nilai RPA) b. Densitas Hal. 2.0PA. 12%</p> <p>f. Beragam Kematangan (25%) g. Pengalihan I 07 dan TSP (15%) h. Capaian Output (25%)</p> <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p>Dasar Hukum : Peraturan Menteri Perencanaan Keuangan Nomor Per 5/19/2022 tentang Petunjuk Teknis penjabaran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Risiko Kementerian Keuangan</p>			Tahunan
3.4	<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengalihan Mitter I 07 Bakti Rappan DPA 202 Dengan Unsur Administrasi</p> <p>Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategi K1 (15%) - Agranasi Capaian RP Unit Eselon (25%) - Agranasi Capaian RD Unit Eselon (35%) b. Efisiensi 25% yaitu anggaran nilai efisiensi setiap</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p>	<p>Setretaris</p>	<p>Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan</p>	
3.5	<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengalihan Mitter I 07 Bakti Rappan DPA 202 Dengan Eselon</p> <p>Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategi K1 (15%) - Agranasi Capaian RP Unit Eselon (25%) - Agranasi Capaian RD Subes (35%) b. Efisiensi 25% yaitu anggaran nilai efisiensi setiap</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p>	<p>Setretaris</p>	<p>Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan</p>	

Terdapat dan Tergulana (dikurangi dengan waktu toleransi pengalihan)				
	<p>3.5 Perencanaan anggaran yang dianggarkan pada tahun berjalan</p> <p>Amal usaha yang tidak dimatikan</p> <p>Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengalihan tingkat pertama untuk melakukan anggaran pada tahun berjalan dan tidak melakukan pengalihan pada saat anggaran dimatikan.</p> <p>Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2.144/KMA/KA/2012 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>			<p>Tahunan</p>
	<p>3.6 Perencanaan anggaran yang dianggarkan pada tahun berjalan</p> <p>Amal usaha yang tidak dimatikan</p> <p>Catatan : 1. Kinerja perencana pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tidak pernah yang dilakukan merupakan tindak pidana dengan atau kerugian harta benda tidak lebih dari Rp.500.000.000 atau tiga lima ratus ribu rupiah atau tidak lebih dari lima minimum proses peradilan. Kinerja dalam putusan dengan metode peradilan elektronik sehingga tidak pernah dengan adanya pengalihan anggaran untuk diberikan melalui metode elektronik yang pernah; b. Tidak pernah melakukan data ulang; c. Tidak pernah dengan ancaman hukuman maksimal 2 (dua) tahun penjara dalam salah satu kabupaten, termasuk tidak</p>			<p>Tahunan</p>

6. Matriks Renstra 2025-2029

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis			2025		2026		2027		2028		2029										
	Uraian	Indikator Kinerja		Strategis	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)									
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu	95%								Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Berkasakatan Manajemen Peradilan Militer		95	157.085	95	329.181	95	329.181	95	329.181	95	329.181									
																95	103.230	95	273.681	95	215.000	95	215.000	95	215.000	95	215.000					
																					70	1003.310	70	215.000	70	215.000	70	215.000	70	215.000	70	215.000
																					25	2.925	25	2.925	25	2.925	25	2.925	25	2.925	25	2.925
																					48	4.200	48	15.000	48	15.000	48	15.000	48	15.000	48	15.000
												50		50		50		50		50		50		50								

												Index persensi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%		Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%		Jumlah salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu.	70 Perkara	22.400	70 Perkara	40.000	70 Perkara	40.000	70 Perkara	40.000	70 Perkara	40.000
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Teringgalkan	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	90%		Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	90%	90%	90%	90%	90%		Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	10 Perkara	53.850	10 Perkara	78.750	10 Perkara	98.750	10 Perkara	118.750	10 Perkara	128.750

7. Realisasi Anggaran Dipa 01 dan 05

➤ **Anggaran Dipa 01**

No	Pagu DIPA semula (Rp)	Pagu DIPA setelah revisi (RP)	Realisasi (RP)	(%)	Sisa anggaran (Rp)
1.	3.901.926.000	4.666.808.000	4.630.601.784	99,22	36,206,216

No	Pagu DIPA (Rp)	Pagu Revisi	Realisasi anggaran (Rp)	Sisa anggaran (Rp)	%
1.	2.260.069.000	3.123.043.000	3.097.335.297	25.707.703	96.18

No	Pagu DIPA (Rp)	Pagu Revisi	Realisasi anggaran (Rp)	Sisa anggaran (Rp)	%
1.	1.586.257.000	1.488.765.000	1.488.266.487	498.513	99,97

No	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1.	55.000.000	45.000.000	10.000.000	81.82

➤ **Anggaran Dipa 05**

No	Kegiatan	Pagu semula (RP)	Pagu setelah revisi (RP)	Realisasi (RP)	(%)	Sisa Pagu (Rp)
1.	Perkara yang dilayani siding di luar Gedung di lingkungan Peradilan Militer (sidang di Luar Gedung Pengadilan)	53.850.000	53.850.000	53.850.000	100	0
2.	Perkara pidana Tingkat Pertama yang diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I-01 s.d III-18	100.310.000	71.400.000	71.213.114	99,74	186.886
3.	Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I-01 s.d III-18	2.925.000	2.925.000	2.849.515	97.42	75.485
	Total	157.085.000	128.175.000	127.912.629	99.80	262.371

8. Revisi Monev RAK 2025 (TW IV)

REVISI MONEV TRIWULAN IV
RENCANA AKSI PERUBAHAN STRUKTUR TAHUN 2025
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN



Lampiran 1
SURAT SEKRETARIS MAJEMKAM AGUNG
NOMOR : 27/00/SUR/001/2025
TANGGAL : 13 Januari 2025

REVISI MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERUBAHAN STRUKTUR TRIWULAN IV TAHUN 2025
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Tersedianya Perangkat yang e-RAFE transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu 2. Persentase penyelesaian pengurusan salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak 3. Persentase pengurusan pemberitahuan putusan (antar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak 4. Persentase pengurusan salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak 5. Persentase putusan pengadilan yang dituangkan pada direktori putusan	100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100%

6.	Persentase perkara yang berhasil dituntaskan melalui pendekatan keadilan restoratif	0%	0%	100%
7.	Persentase perkara pidana militer yang dituntaskan secara elektronik (e-berputar)	25%	0%	75%
8.	Persentase laporan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-berputar)	0%	0%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pengelolaan berkas perkara	Terdapat 1 (satu) berkas perkara umum yang ditampikan oleh Onas IV-16 Balikpapan ke Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah selesai dan di input pada SIP.	-	-
2.	Penetapan hari sidang	3 (tiga) perkara umum yang sudah di register telah di hear penentuan hari sidang dan diinput pada aplikasi SIP.	-	-
3.	Penerbitan di Sidang Pengadilan/Pendalaman perkara	Penerbitan dilaksanakan sesuai Jadwal yang telah ditetapkan	Penerbitan di Sidang Pengadilan/Pendalaman perkara	Penerbitan dilaksanakan sesuai Jadwal yang telah ditetapkan
4.	Eksekusi/Pembayaran perkara/ upaya hukum	Perkara yang telah diputus, penanggung jawab perkara yang telah ditunjuk dan HHT sudah sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang.	Rincian penyelesaian perkara keadilan dan	-

2.	Persentase perkara yang berhasil dituntaskan melalui pendekatan keadilan restoratif	0%	0%	100%
3.	Persentase perkara pidana militer yang dituntaskan secara elektronik (e-berputar)	25%	0%	75%
4.	Persentase laporan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-berputar)	0%	0%	100%
5.	Persentase putusan pengadilan yang dituangkan pada direktori putusan	100%	100%	100%
6.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%
7.	Persentase penyelesaian pengurusan salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
8.	Persentase pengurusan pemberitahuan putusan (antar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
9.	Persentase pengurusan salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
10.	Persentase putusan pengadilan yang dituangkan pada direktori putusan	100%	100%	100%

8.	Mengajukan Putusan pada Direktori Putusan	Putusan telah dituangkan di Direktori Putusan sebanyak 12 (dua belas) perkara	-	-	-
9.	Mendata perkara yang mencajahi keadilan restoratif	Jumlah perkara yang mencajahi keadilan restoratif pada TW 4 sebanyak 0 (nol) perkara	-	-	-
10.	Penyerahan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif	Perkara yang diserahkan melalui pendekatan keadilan restoratif pada TW 4 tahun 2025 sebanyak 0 (nol) perkara	-	-	-
11.	Penyerahan perkara pidana militer secara elektronik melalui e-berputar	Jumlah penyerahan berkas perkara pidana militer yang ditampikan secara elektronik melalui e-berputar pada TW 4 sebanyak 0 (nol) perkara	-	-	-
12.	Layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik menggunakan aplikasi e-berputar	Salah satu layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik menggunakan aplikasi e-berputar	-	-	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Mempromosikan Tingkat Keaktifan dan Kepuasan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	80%	96,96%	113,7%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Penyusunan Tim Survei Kepuasan Masyarakat	Kadivisi mengakhiri Surat Perintah Nomor : 41/SPM/WI-MILIT/SM-JEL/2025 tanggal 2 Januari tentang Penunjukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2025	-	-
2.	Melaksanakan survei kepuasan masyarakat	Tindakan survei kepuasan masyarakat dilakukan secara online melalui aplikasi e-Survei dan secara manual dengan penugasan kasus/sosial kepancam masyarakat.	Kepuasan kualitas masyarakat dilakukan secara online (QR code) tidak lancar karena permasalahan kontak layanan digital. Kurangnya minat pengguna layanan dalam mengisi e-Survei secara online maupun secara manual.	Memberikan pendampingan yang awal dan profesional kepada responden serta menyelesaikan alternatif survei secara manual. Pengasutan melalui user manual dan akses anasir pelayanan yang ada dalam pelaksanaan survei terisi dengan lengkap. Survei Kepuasan Masyarakat akan menjadi dasar evaluasi dan perbaikan pelayanan guna meningkatkan kinerja, transparansi dan kepercayaan publik terhadap layanan pengadilan.
3.	Monev pelaksanaan hasil survei Kepuasan Masyarakat	Peningkatan indeks survei layanan masyarakat didukung oleh pengasutan Tim survei yang kompeten dan mampu berkolaborasi dengan segenap dan ramah kepada semua penyangga maupun pengguna layanan serta terus melakukan perbaikan terhadap	-	-

4.	Melaksanakan tindak lanjut hasil monev Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Survei dan monev dari responden. Meningkatkan kompetensi petugas layanan, penambahan teknologi informasi dan pengasutan kasus/sosial masyarakat sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan. Pelaksanaan tindak lanjut terus dilakukan dan dicek secara berkala guna memastikan perbaikan layanan dan pencapaian indeks kepuasan masyarakat secara berkelanjutan	-	-
----	---	---	---	---

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Tertutupnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan (B1) Badan Urusan Administrasi 3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan (DIPA) Ditjen Badilmitlan 4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan (DIPA) (D1) Badan Urusan Administrasi	85% 95% 85% 80%	32,5% 96,75% 88,85% 100%	48,67% 101,84% 104,50% 125%

5.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan (DIPA) (D5)	70%	80,58%	115,11%
6.	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	90	90	100%


NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pemetaan pengembangan kompetensi ASN	Melakukan pemetaan pengembangan kompetensi pegawai yang ada dan telah mengidentifikasi kebutuhan, dilaksanakan melalui survey angket mengenai kompetensi ASN	Terjadi gap kompetensi yang cukup tinggi antara personal diaman dan bagian keanggotaan yang terdapat bentuk atau tidak ada di bandingkan dengan unit bagian lain	Mengajukan permohonan untuk di fasilitasi kegiatan bentuk ke-aman dan seperti pelatihan SAKIP, LKJH serta pembantuan ANKIP dan ABR
2.	Pemetaan Kinerja Pegawai	Melakukan pemetaan kinerja pegawai melalui Survei Kinerja Pegawai (SKP) dengan target 80% dan Terutama Kerja Pegawai (TKP) lebih 40%	Pembuatan SKP dan TKP didukung secara maksimal oleh bagian keanggotaan dan akan dilaksanakan minggu ke-10 bulan ini akan dilakukan seperti apa yang ada pada laporan	Memberikan saran kepada pejabat-pejabat minimal untuk mendukung laporan monitoring dengan menyertakan evidens serta secara cermat ulang
3.	Pemetaan kompetensi ASN dan Personal	Monitoring pelaksanaan presentasi online pada aplikasi SKP, Monitoring pelaksanaan presentasi manual Hutan, PNS dan PPPK. Mengajukan daftar hadir pegawai pada aplikasi kompetensi dan monitoring laporan kemajuan dengan mengasutan di bagian ke-aman	-	-

9. Laporan Tindak Lanjut

MATRIK TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

No	Rekomendasi LHE Tahun 2024	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
A. Perencanaan Kerja								
1.	Pada pengelolaan dokumen Perencanaan Kinerja agar pedoman teknis perencanaan kinerja internal yang mencakup antara lain kebijakan penyusunan, perubahan dan sistematika penyajian dokumen perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, penyusunan rencana aksi dan jadwal monitoring evaluasi kinerja disesuaikan dengan kondisi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.	Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia, namun terdapat kondisi: Pedoman teknis perencanaan kinerja internal yang mencakup antara lain kebijakan penyusunan, perubahan dan sistematika penyajian dokumen perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, penyusunan rencana aksi dan jadwal monitoring evaluasi kinerja belum memadai.	Juknis/Pedoman Pelaksanaan Anggaran/Kinerja Daerah (RKAKL), Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Internal, Hasil Movev Rencana Aksi Kinerja TW 1 sampai dengan TW.4 Tahun 2024. (terlampir).	4 Bulan	1 Agustus – 1 Desember 2024	Kadilmil	Selesai	Link Dukung
2.	Dokumen Perencanaan Kinerja agar memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penalaran (cascading) disetiap level secara logis serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting), serta agar Renstra menyajikan penjelasan keterkaitan	Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standart yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penalaran (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain	Terdapat IKU SMART serta Renstra yang menyajikan penjelasan keterkaitan Rencana Jangka Panjang MA dengan Renstra Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan terdapat	4 bulan	1 Agustus – 1 Desember 2024	Kadilmil	Selesai	Link Dukung

			dimanfaatkan dan memudahkan dalam pengerjaan Akuntabilitas Kinerja yang menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga seluruh laporan dapat disampaikan melalui aplikasi Sistem Evaluasi & Monitoring Akuntabilitas Kinerja (SEMAR) sebelum tenggat waktu yang diberikan.					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

Balikpapan, 28 Maret 2025
 Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

 Desman Wijaya, S.H., M.H.
 Kolonel Laut (H) NRP 13134/P

